



**JAWABAN PEMERINTAH
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2026
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**Rapat Paripurna DPR RI, 21 Agustus 2025
REPUBLIK INDONESIA**

A. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK, ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah menyampaikan apresiasi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasional Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** yang mendukung target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen sebagai proyeksi optimis namun realistis. Pemerintah sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka, melainkan harus berkualitas, inklusif, dan memberi manfaat nyata bagi rakyat melalui penguatan konsumsi rumah tangga, stabilitas harga, daya beli, penciptaan lapangan kerja, serta belanja produktif pada sektor pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan perlindungan sosial. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, strategi fiskal utama diarahkan pada hilirisasi, industrialisasi, diversifikasi produk, penguatan ekspor, serta akselerasi investasi dengan dukungan pembangunan infrastruktur merata, optimalisasi peran BPI Danantara, dan penyederhanaan regulasi agar iklim usaha semakin kondusif. Di sisi lain, Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas, efisiensi logistik, dan peningkatan produktivitas nasional, termasuk percepatan realisasi belanja modal Pemerintah sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan dan menarik investasi swasta.

Pemerintah juga sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk melakukan industrialisasi pada sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, konsistensi kebijakan hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, serta penyederhanaan regulasi dan birokrasi untuk mendorong iklim investasi yang lebih sehat dan kompetitif.

Sejalan dengan itu, hilirisasi mineral kritis menjadi fokus utama Pemerintah karena potensinya yang signifikan terhadap peningkatan nilai tambah dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga sepakat bahwa

perluasan hilirisasi ke sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan merupakan strategi penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan memastikan pemerataan manfaat pembangunan hingga ke daerah.

Upaya pembenahan tata kelola birokrasi, penyederhanaan perizinan, serta peningkatan kepastian hukum dalam kebijakan ekspor-impor juga terus dilakukan agar Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Terkait usulan penyusunan *pipeline* proyek yang lebih jelas, pemerintah menyambut baik dan akan terus memperkuat perencanaan serta pengawasan proyek strategis agar pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata.

Pemerintah meyakini bahwa melalui sinergi antara kebijakan fiskal yang ekspansif dan terarah, reformasi struktural yang konsisten, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, pertumbuhan ekonomi ke depan dapat dicapai secara inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai strategi reformasi yang akan dilakukan untuk mewujudkan "kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi", dapat dijelaskan bahwa Pemerintah akan menerapkan 8 program prioritas untuk mewujudkannya yang akan dilaksanakan secara serentak, dengan melakukan penguatan/peningkatan/penajaman pada: (1) ketahanan pangan; (2) ketahanan energi; (3) makan bergizi gratis; (4) pendidikan; (5) kesehatan; (6) pembangunan desa, koperasi dan UMKM; (7) pertahanan semesta; dan (8) percepatan investasi dan perdagangan global. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial agar Indonesia semakin tangguh dan sejahtera serta tidak bergantung kepada negara lain.

Pada Ketahanan Pangan, difokuskan pada subsidi pupuk, bantuan alsintan, bantuan benih, subsidi bunga KUR, penguatan infrastruktur pertanian, dan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan. Melalui ketahanan energi, Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Melalui makan bergizi gratis,

Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan gizi masyarakat dengan pola gizi yang seimbang dan sekaligus mendorong peningkatan penggunaan sumber pangan lokal serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro-kecil.

Dari sisi pendidikan, Pemerintah mendorong perluasan Sekolah Unggul Garuda yang akan difokuskan untuk meningkatkan akses ke Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri, serta Sekolah Rakyat yang diprioritaskan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Dari sisi kesehatan, Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas bagi semua usia, sejak dalam kandungan hingga lanjut usia, antara lain dengan penyelenggaraan cek kesehatan gratis, dan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan fasilitas kesehatan. Melalui pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional agar mampu menbghadapi gejolak global.

Selanjutnya pada bidang pertahanan semesta, diarahkan untuk memperkuat postur pertahanan yang lebih modern antara lain melalui penguatan dan modernisasi alutsista, pengembangan dan optimalisasi industri pertahanan, dan peningkatan kesiapan komponen cadangan yang memiliki daya gentar di kawasan yang mampu menjaga kedaulatan dan obyek-obyek vital strategis yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kemudian, melalui percepatan investasi dan perdagangan global, diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di semua wilayah, peningkatan kemampuan daya saing dan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan peranan Indonesia dalam rantai pasok global.

Pemerintah menyambut baik pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional** yang menekankan pentingnya pengendalian inflasi secara hati-hati dengan tetap menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah bersama

Bank Indonesia secara konsisten menciptakan bauran kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas pangan yang rentan berfluktuasi atau *volatile food*. Target inflasi pada RAPBN 2026 ditetapkan sebesar 2,5 persen diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat dengan tetap memberikan ruang insentif bagi dunia usaha dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID).

Penguatan daya beli masyarakat menjadi prioritas utama dalam RAPBN tahun 2026. Hal ini tecermin melalui beberapa program strategis yang terus diupayakan oleh Pemerintah, diantaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi energi, serta FLPP perumahan. Pemerintah juga terus menjaga stabilitas harga pangan melalui peran BULOG serta melaksanakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Pemerintah sejalan dengan pandangan fraksi bahwa tingkat inflasi yang wajar dapat menjadi insentif bagi produksi dan konsumsi. Melalui beberapa program strategis tersebut, Pemerintah optimis inflasi pada 2026 dapat dikendalikan secara efektif sehingga dapat meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait rasionalitas asumsi nilai tukar Rupiah sebesar Rp16500 per dolar AS. Menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah sangat penting untuk ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah percaya bahwa dibutuhkan koordinasi yang erat antara otoritas fiskal dan moneter dalam merespons tekanan eksternal maupun internal terhadap nilai tukar. Stabilitas nilai tukar didukung oleh berbagai langkah kebijakan yang terkoordinasi, termasuk menetapkan imbal hasil

obligasi Pemerintah yang kompetitif, mengendalikan inflasi dalam rentang sasaran, serta menjaga prospek pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** mengenai stabilitas nilai tukar Rupiah, dapat kami sampaikan bahwa kondisi Rupiah tetap terjaga stabil dan bahkan mencatat apresiasi 1,79% *mtd*, meskipun masih terdepresiasi ringan sebesar 0,36% secara *ytd* (per 15 Agustus 2025). Hal ini mencerminkan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan kepercayaan investor yang terus mengalir, tercermin dari arus masuk modal asing di pasar SBN. Stabilitas nilai tukar Rupiah ditopang oleh bauran kebijakan yang konsisten, intervensi pasar valas yang terukur, serta fundamental ekonomi yang kuat, salah satunya tercermin dari surplus neraca perdagangan di bulan Juni 2025 sebesar USD4,1 miliar dan cadangan devisa di bulan Juli 2025 yang tetap tinggi sebesar USD152,0 miliar atau setara 6,3 bulan pembiayaan impor.

Pemerintah bersama Bank Indonesia terus berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar melalui koordinasi kebijakan yang erat, termasuk penguatan devisa hasil ekspor ke sistem perbankan nasional. Dengan kombinasi stabilitas pasar keuangan, aliran modal asing yang berkelanjutan, dan cadangan devisa yang kokoh, kami optimis rupiah akan terus stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing dan ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah menanggapi pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah kondisi ketidakpastian global, dapat kami sampaikan bahwa proyeksi nilai tukar pada kisaran Rp16.500 per dolar AS mencerminkan pendekatan yang realistis dan hati-hati di tengah ketidakpastian global. Pada awal tahun 2025, tekanan Rupiah dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat, dinamika geopolitik, serta sentimen pasar atas kebijakan tarif perdagangan. Namun, prospek pelonggaran suku bunga The Fed, inflasi domestik yang tetap terjaga, dan semakin positifnya persepsi investor terhadap ekonomi Indonesia menjadi faktor pendukung bagi potensi stabilitas nilai tukar. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat ketahanan sektor eksternal, tidak hanya melalui bauran kebijakan fiskal dan

moneter, tetapi juga melalui optimalisasi devisa hasil ekspor, khususnya dari sektor komoditas unggulan dan hilirisasi. Upaya ini terbukti mendukung stabilitas nilai tukar dan memperkuat ketersediaan valas domestik, sehingga kebutuhan dunia usaha dapat terpenuhi tanpa harus menekan cadangan devisa. Selain itu, langkah-langkah pendalaman pasar keuangan domestik juga terus diperkuat, termasuk melalui pengembangan instrumen keuangan yang lebih beragam dan likuid. Hal ini diharapkan dapat memperkuat basis pembiayaan dalam negeri, meningkatkan daya tarik pasar keuangan Indonesia, serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak eksternal. Dengan sinergi kebijakan yang erat, prospek pelonggaran kondisi global, dan fundamental ekonomi domestik yang solid, Pemerintah optimis stabilitas nilai tukar akan terjaga secara berkelanjutan. Hal ini akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika global.

Pemerintah juga turut mengapresiasi pandangan konstruktif **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait asumsi suku bunga SBN 10 Tahun. Secara keseluruhan, masukan ini semakin memperkuat arah kebijakan Pemerintah untuk menjaga asumsi suku bunga SBN 10 Tahun yang kredibel, realistis, dan berpihak pada kesinambungan fiskal, sambil tetap adaptif terhadap dinamika global maupun kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** yang menegaskan pentingnya mengaitkan asumsi suku bunga SBN dengan tren inflasi dan potensi pelonggaran moneter global, dapat disampaikan bahwa hal ini sudah menjadi pertimbangan Pemerintah, namun kewaspadaan terhadap ketidakpastian yang masih tinggi ke depan perlu difaktorkan dalam menentukan asumsi agar APBN tetap kredibel dan realistis.

Pemerintah menghargai pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Partai Gerindra** yang mengingatkan bahwa asumsi suku bunga SBN bukan hanya angka melainkan juga instrumen untuk mendorong disiplin fiskal. Dapat kami sampaikan bahwa bahwa asumsi suku bunga SBN 10 Tahun yang terkendali menjadi sinyal positif bagi ketahanan fiskal dan kepercayaan investor terhadap Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah menekankan pentingnya kehati-hatian dan mitigasi risiko yang menjadi perhatian utama dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Pemerintah juga mengapresiasi pandangan dari **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, terkait target tingkat suku bunga SBN 10 tahun dalam RAPBN 2026 yang diproyeksikan 6,9% lebih rendah dari *outlook* 2025 sebesar 7,0%, sebagai wujud optimisme terhadap prospek ekonomi nasional sekaligus strategi menjaga kredibilitas fiskal dan efisiensi pembiayaan APBN. Pencapaian target ini sangat ditentukan oleh disiplin fiskal, pengendalian defisit di bawah 3% PDB, belanja produktif, dan penguatan penerimaan negara untuk menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah juga memperhatikan dinamika eksternal seperti kebijakan moneter AS, arus modal global, nilai tukar, serta risiko geopolitik dengan memperkuat koordinasi bersama Bank Indonesia dan mengelola utang secara hati-hati. Strategi pembiayaan diarahkan pada perluasan basis investor domestik, pengembangan instrumen syariah dan berkelanjutan, serta diversifikasi sumber pembiayaan luar negeri guna mencegah *crowding out* di pasar domestik dan memperkuat cadangan devisa. Dengan asumsi yield SBN 10 tahun sebesar 6,9% yang dinilai konservatif di tengah ketidakpastian global, namun tetap memperhitungkan peluang positif dari tren penurunan inflasi dunia dan potensi pelonggaran moneter di negara maju, pemerintah optimistis imbal hasil SBN dapat dikelola secara efisien, kompetitif, dan mendukung stabilitas perekonomian.

Pemerintah menyambut baik pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait asumsi harga minyak mentah (ICP) sebesar USD70 per barel yang tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2026 didasarkan pada perhitungan yang moderat dan realistis. Angka ini mempertimbangkan proyeksi kondisi pasar minyak global pada 2026 yang masih dipenuhi ketidakstabilan dan fluktuasi harga sepanjang tahun 2026. Selain itu, harga minyak mentah dunia masih akan sangat dipengaruhi oleh komitmen negara-negara OPEC+ dalam mempertahankan pemotongan produksi. Isu ini terus menjadi sorotan utama dan diperhatikan secara seksama oleh pelaku pasar serta analis minyak internasional. Faktor geopolitik seperti perbedaan arah politik dan persaingan dagang dan ekonomi antara Amerika Serikat dan China juga menjadi salah satu pusat perhatian besar dari pelaku pasar minyak global, mengingat Amerika Serikat dan China merupakan negara pengimpor minyak mentah terbesar di dunia. Berdasarkan pertimbangan menyeluruh terhadap berbagai faktor penentu volatilitas harga minyak mentah global, baik dari sisi suplai maupun permintaan, Pemerintah menetapkan asumsi ICP sebesar USD70 per barel untuk RAPBN 2026.

Pemerintah menanggapi pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait penetapan target *lifting* minyak sebesar 610 rbph dan *lifting* gas sebesar 984 rbsmph yang disampaikan dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2026. Dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah mempertimbangkan faktor-faktor yang akan memengaruhi capaian *lifting* migas ke depan dan hasil evaluasi terhadap capaian *lifting* migas dalam beberapa tahun belakangan. Salah satu faktor yang masih akan memengaruhi capaian *lifting* migas adalah harga minyak mentah. Semakin tinggi harga minyak mentah, biasanya diikuti dengan semakin menggeliatnya aktivitas hulu migas. Pergerakan harga minyak mentah pada tahun depan diperkirakan masih akan berfluktuasi. Pemerintah akan menyikapi kondisi-kondisi tersebut dengan melakukan kegiatan

hulu migas yang lebih progresif, masif, efektif dan efisien menuju pencapaian target *lifting* migas tahun 2026, antara lain:

1. Melanjutkan upaya pencapaian *lifting* migas, antara lain terus melakukan perbaikan perizinan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, penyempurnaan regulasi, optimalisasi produksi melalui penerapan teknologi a.l: *Enhanced Oil Recovery* (EOR), teknik *Multi Stage Fracturing* (MSF), dan *Horizontal Drilling*;
2. Mendorong KKKS melaksanakan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas yang menarik.
3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan melalui penggunaan teknologi secara terintegrasi.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa perlu terus dibangun ekosistem ekonomi yang inklusif. Pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi dan kebijakan fiskal yang inklusif ditempuh dengan menekankan pada keseimbangan antara upaya untuk tetap konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan terjaganya APBN yang sehat dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif antara lain melalui: (1) memperkuat daya saing produk di pasar domestik dan global termasuk pemberian jaminan produk halal melalui kemitraan, standardisasi dan sertifikasi; (2) pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM agar semakin produktif; (3) percepatan hilirisasi dan industrialisasi berbasis komoditas SDA yang memiliki keunggulan komparatif; (4) penerapan kebijakan energi hijau dan transisi energi secara bertahap; (5) peningkatan akses pelayanan digital di seluruh wilayah; (6) peningkatan pembangunan konektivitas antar pusat pertumbuhan, antara kota-desa, dan antara jawa-luar jawa; (6) penguatan kualitas ASN berbasis sistem merit dan melaksanakan reformasi birokrasi di semua lini; (7) penguatan supremasi

hukum yang mengedepankan kepastian, kemanfaatan dan keadilan; dan (8) memperkuat stabilitas pertahanan dan keamanan yang memiliki daya gentar di kawasan yang disertai dengan penguatan stabilitas makro ekonomi.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa APBN merupakan instrumen Keuangan Negara yang dimanfaatkan untuk memenuhi kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam tata kelola anggarannya terutama diarahkan agar : (1) semakin efisien dan efektif dan dibelanjakan untuk hal-hal yang bersifat produktif; (2) mendukung program strategis dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian, khususnya pada bidang pangan, energi, kesehatan dan pendidikan; (3) optimal dalam pemberian layanan publik dengan tetap menjaga kesejahteraan aparatur negara; (4) memperkuat pelaksanaan reformasi subsidi dan bantuan sosial yang lebih efektif dan tepat sasaran; (5) semakin bersinergi dan harmonis dalam implementasi kebijakan fiskal di tingkat pusat dan daerah, sehingga target-target pembangunan nasional dapat dicapai secara lebih merata.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** dan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait penyesuaian standar pengukuran kemiskinan dan sepakat bahwa pendekatan harus holistik serta mengikuti dinamika kesejahteraan, dengan memanfaatkan data BPS sebagai standar nasional dan pendekatan *Purchasing Power Parity* (PPP) Bank Dunia sebagai *benchmarking* global. Pemerintah juga memandang perlunya pemutakhiran metode pengukuran kemiskinan agar lebih akurat sebagai pijakan kebijakan, serta menegaskan pentingnya intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat melalui sinergi Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam Tim Pengendali Inflasi.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sejalan dengan strategi yang tidak hanya bertumpu pada bantuan sosial tetapi juga pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan layanan dasar untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin dan rentan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan ekonomi desa dengan Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan UMKM, pembiayaan usaha mikro dan ultra mikro disertai pendampingan, serta hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan agar memberi nilai tambah lebih besar. Di sisi lain, pemerintah memperkuat perlindungan sosial melalui integrasi program Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, subsidi energi, dan jaminan kesehatan berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran, sekaligus meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, dan sanitasi. Sebagai penopang jangka panjang, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dijalankan melalui makan bergizi gratis, sekolah rakyat, digitalisasi pembelajaran, renovasi sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga anak-anak dari keluarga miskin mendapat gizi, pendidikan, dan kesempatan setara. Dengan sinergi pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, layanan dasar, dan investasi SDM melalui PHTC, pemerintah optimis target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026 dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.

Pemerintah menghargai pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap isu ketimpangan pendapatan dan sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat. Data BPS Maret 2025 menunjukkan Rasio Gini turun menjadi 0,379 dari 0,384 pada Maret 2024, mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan dan hasil positif kebijakan pemerintah. Dalam KEM PPKF 2026, target Rasio Gini ditetapkan pada kisaran 0,377–0,380 melalui strategi perluasan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak, dan perlindungan sosial berbasis DTSEN yang lebih tepat sasaran, disertai pemberdayaan ekonomi produktif di desa dan kota. Penguatan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih dan dorongan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan kelautan diharapkan membuka lapangan kerja lokal serta mempersempit kesenjangan desa–kota. Pemerintah menegaskan pertumbuhan tanpa pemerataan hanya menciptakan kesenjangan baru, sehingga strategi fiskal diarahkan agar pertumbuhan sejalan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan,

sekaligus optimis target Rasio Gini 2026 dapat tercapai dan memperkuat keadilan publik.

Pemerintah menghargai perhatian **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap isu ketenagakerjaan dan mencatat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 4,82% pada Februari 2024 menjadi 4,69% pada Februari 2025 sebagai bukti efektivitas strategi penciptaan lapangan kerja. Dalam KEM PPKF 2026, target TPT ditetapkan pada kisaran 4,44–4,96% dengan fokus pada perluasan investasi padat karya melalui hilirisasi sektor strategis, transformasi digital, dan penguatan UMKM, yang dilengkapi reformasi pendidikan vokasi dengan pendekatan *link and match* bersama dunia usaha dan industri. Pemerintah juga menekankan pembangunan infrastruktur ekonomi, peningkatan daya saing tenaga kerja melalui *reskilling–upskilling*, serta dukungan pembiayaan untuk wirausaha muda agar bonus demografi menjadi motor pembangunan. Dengan langkah-langkah tersebut dan sinergi lintas pemangku kepentingan, pemerintah optimis target penurunan pengangguran hingga 2026 dapat tercapai sekaligus membuka peluang akselerasi.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) yang pada 2020 tercatat 0,55 dan ditargetkan naik menjadi 0,57 pada 2026, dengan strategi utama peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan gizi anak sebagai fondasi produktivitas jangka panjang. Upaya dilakukan melalui reformasi kurikulum Merdeka Belajar, perluasan digitalisasi pembelajaran, serta penguatan pendidikan vokasi dengan konsep *link and match* bersama dunia usaha dan industri, disertai peningkatan kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik melalui tunjangan profesi, beasiswa dosen, redistribusi guru ke daerah 3T, dan pemanfaatan teknologi jarak jauh. Selain itu, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, renovasi sekolah, dan peningkatan kesejahteraan guru memastikan pembangunan modal manusia dimulai sejak dini. Dengan kombinasi langkah tersebut, pemerintah optimis

target IMM 0,57 pada 2026 dapat tercapai dan memperkuat daya saing Indonesia di kawasan.

Pemerintah menghargai pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait ketenagakerjaan, dan berdasarkan data BPS Februari 2025 mayoritas angkatan kerja masih berada di sektor informal meski ada peningkatan serapan tenaga kerja formal seiring perbaikan iklim investasi. Dalam KEM PPKF 2026, pemerintah menargetkan proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 37,95% melalui strategi perluasan investasi padat karya lewat hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur ekonomi, dan transformasi digital, disertai dorongan UMKM naik kelas agar masuk rantai pasok formal dengan jaminan upah, perlindungan sosial, dan akses layanan ketenagakerjaan. Selain itu, penguatan pelatihan vokasi, SMK, dan politeknik dengan konsep *link and match* serta reformasi regulasi ketenagakerjaan diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri dengan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah optimis proporsi pekerjaan formal terus meningkat sehingga pekerja memperoleh perlindungan, daya beli yang lebih tinggi, serta kontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif menuju Indonesia Emas 2045.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas perhatian **Fraksi Partai Demokrat** terhadap isu ketenagakerjaan, ketimpangan, kemiskinan, pertanian, dan perlindungan pekerja informal, serta menegaskan bahwa berbagai strategi tengah dijalankan untuk menjawab tantangan tersebut. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sudah terlihat akan dilanjutkan dengan insentif bagi dunia usaha, penyederhanaan regulasi, penguatan keterampilan tenaga kerja, dan pemanfaatan ekonomi digital agar transisi pekerja informal ke formal semakin cepat. Untuk menurunkan Rasio Gini, pemerintah memperkuat perlindungan sosial berbasis data, memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan di luar Jawa, hilirisasi industri, dan dukungan bagi UMKM padat karya. Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem difokuskan pada stabilitas harga pangan, bantuan sosial adaptif,

penciptaan lapangan kerja produktif, serta program makanan bergizi gratis. Sementara itu, peningkatan kesejahteraan petani ditempuh melalui penyediaan input pertanian tepat sasaran, modernisasi teknologi, penguatan koperasi, serta kebijakan harga yang melindungi petani sekaligus mendukung cadangan beras nasional. Di sisi lain, pekerja informal diperkuat aksesnya terhadap jaminan sosial melalui skema subsidi, integrasi data, serta kolaborasi dengan platform digital dan koperasi, disertai peningkatan literasi agar perlindungan sosial dipahami sebagai investasi kesejahteraan. Dengan langkah-langkah terpadu tersebut, pemerintah optimis peningkatan kualitas pasar kerja, pengurangan ketimpangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kesejahteraan petani dan pekerja informal dapat tercapai secara berkelanjutan.

B. PENDAPATAN NEGARA

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait target pendapatan negara pada kisaran 12,24 persen terhadap PDB, dapat kami sampaikan target tersebut merupakan hasil dari pertimbangan yang hati-hati dengan ekstra effort, selaras dengan strategi kebijakan fiskal untuk mengoptimalkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan. Proyeksi ini merupakan cermin kebijakan Pemerintah untuk menyediakan ruang fiskal yang memadai guna menghadapi tekanan eksternal, untuk merespon dinamika ekonomi global, serta menjaga daya dorong kebijakan ekonomi domestik.

Kami menyambut baik pandangan terkait pentingnya memperkuat strategi mobilisasi pendapatan demi tercapainya konsolidasi fiskal 2,48 persen dari PDB. Hal ini dilakukan melalui pengawasan terintegrasi, optimalisasi *Coretax System*, perluasan pertukaran data K/L, serta digitalisasi pemungutan pajak termasuk transaksi digital. Langkah ini diyakini memperluas basis pajak secara adil, menjaga keberlanjutan fiskal, dan mendukung pendanaan program prioritas nasional.

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait kinerja pendapatan negara, optimalisasi pendapatan negara akan terus diupayakan dengan tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan hidup, dan regulasi yang adaptif terhadap perekonomian global. Dalam meningkatkan *tax ratio*, pemerintah akan mendorong *extra effort* melalui peningkatan kepatuhan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah juga mencermati usulan diversifikasi sumber penerimaan melalui instrumen fiskal baru. Namun,

kebijakan ini akan diimplementasikan secara bertahap dan selektif, dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi dan kesiapan sektor usaha.

Kami sepakat bahwa diversifikasi penerimaan, perbaikan administrasi, dan peningkatan kepatuhan adalah penting dalam mencapai target penerimaan. Selain itu, kami juga sejalan dengan pandangan untuk tidak membebani sektor riil secara berlebihan. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a) Melakukan modernisasi administrasi (digitalisasi) memanfaatkan reformasi *Coretax System* berintegrasi dengan AI, optimasi pertukaran informasi dan data baik di dalam maupun luar negeri, revidi dan amandemen kebijakan perpajakan yang tepat sasaran;
- b) Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif dengan menerapkan *multidoor approach* bekerjasama dengan APH (Kejaksaan, Polri, PPATK, KPK) termasuk *joint program* dengan K/L terkait;
- c) Memperkuat kepercayaan publik melalui kerja sama dengan pihak eksternal, misalnya *NGO-Transparency International*, Satgas Optimalisasi Penerimaan Negara, serta Stranas Pencegahan Korupsi secara lebih inklusif;
- d) Membangun organisasi yang lebih efektif dengan SDM yang berintegritas, profesional, dan humanis;
- e) Mengimplementasikan pemungutan Pajak Penghasilan oleh Platform *e-commerce* yang ditujukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan pajak, namun Wajib Pajak dengan peredaran usaha tertentu di bawah Rp500 juta tetap mendapat pengecualian dari skema pemajakan; dan
- f) Merancang portofolio insentif pajak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, UMKM, dunia usaha, dan iklim investasi.

Pemerintah juga menyampaikan apresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang mendukung perluasan basis perpajakan pada sektor-sektor yang selama ini kurang tersentuh, seperti *underground economy*, *informal economy*, dan *illegal economy*. Pemerintah setuju dengan pandangan tersebut

dan berkomitmen mempersempit *tax gap* yang menurut berbagai kajian masih berkisar 6–9 persen dari PDB.

Selain itu, Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi dari kepabeanan dan cukai. Intensifikasi dilakukan melalui penguatan kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) berbasis empat pilar dengan dukungan DBH CHT, penyesuaian tarif Bea Masuk komoditas tertentu, optimalisasi pengelolaan nilai pabean, pengembangan klasifikasi barang adaptif, serta penguatan program kolaboratif lintas unit di Kementerian Keuangan. Sementara itu, kebijakan ekstensifikasi yang akan dilakukan antara lain ekstensifikasi BKC berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) dan penerapan Bea Keluar terhadap produk emas dan batubara dengan tetap memperhatikan kesiapan industri dan kondisi perekonomian.

Di bidang pengawasan, dilakukan penguatan pengawasan laut, perbatasan, pesisir, pelabuhan, dan bandara utama. Pemerintah juga meningkatkan upaya pencegahan penyelundupan, peredaran BKC ilegal, barang yang dilarang/dibatasi, peredaran gelap narkoba, serta kejahatan lintas negara, disertai peningkatan efektivitas penegakan hukum serta audit kepabeanan dan cukai.

Dari sisi kelembagaan, langkah strategis meliputi penguatan organisasi, penyempurnaan proses bisnis kepabeanan dan cukai, pemenuhan SDM berintegritas dan kompeten, pengembangan *Smart Customs*, serta peningkatan kualitas komunikasi, publikasi, bimbingan kepada pengguna jasa, dan kerja sama antar lembaga.

Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi NasDem** dalam perluasan basis pajak dengan tetap menjaga iklim usaha, keberlanjutan investasi, dan perlindungan daya beli masyarakat. Pemerintah menekankan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan berbasis data, penguatan administrasi melalui transformasi digital, serta perluasan cakupan ke sektor ekonomi digital

yang selama ini belum tergarap optimal. Pemanfaatan *big data*, pemadanan lintas instansi, dan pengawasan otomatis menjadi kunci dalam menangkap potensi pajak baru sekaligus mengurangi *shadow economy*. Selain itu, penerapan instrumen baru seperti pajak digital diharapkan dapat memperluas basis penerimaan negara sesuai perubahan struktur ekonomi. Sementara itu, penerapan pajak karbon akan diselaraskan dengan kondisi perekonomian dengan mempertimbangkan kesiapan pelaku usaha dan daya beli masyarakat.

Peningkatan *tax ratio* ditempuh secara bertahap dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pemerintah berkomitmen agar kebijakan perpajakan tidak mengganggu daya beli masyarakat maupun iklim investasi, serta terus memberikan dukungan bagi UMKM dan sektor strategis. Di sisi lain, optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dilakukan melalui penguatan sistem CEISA, peningkatan infrastruktur teknologi, serta kapasitas SDM untuk memperkuat monitoring perdagangan lintas batas. Dengan langkah ini, sistem perpajakan diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Gerindra** yang mendorong langkah lebih konkret dalam peningkatan rasio perpajakan. Pemerintah memahami bahwa realisasi rasio perpajakan tahun 2024 yang berada pada level 10,08% dari PDB perlu ditingkatkan secara akseleratif, tanpa menimbulkan distorsi berlebihan terhadap dunia usaha dan aktivitas ekonomi. Untuk itu, strategi perpajakan dalam APBN 2025 dan RAPBN 2026 diarahkan pada implementasi UU HPP, perluasan basis pajak, penguatan pemungutan pajak digital, serta optimalisasi pemanfaatan *Coretax System* dan pertukaran data antarlembaga. Upaya ini juga diperkuat dengan evaluasi belanja perpajakan dan penguatan pengawasan, guna memastikan peningkatan kepatuhan sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat.

Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN pada tingkat yang *prudent*, sejalan dengan upaya memperkuat kesinambungan fiskal jangka menengah. Target rasio perpajakan tahun 2026 ditetapkan naik menjadi 10,47% PDB, selaras dengan peningkatan target pendapatan negara. Pemerintah meyakini pencapaian ini dapat diwujudkan melalui sinergi kebijakan fiskal dan penguatan administrasi perpajakan berbasis digital, sekaligus tetap mendukung daya saing dunia usaha dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi NasDem, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait kinerja penerimaan pajak RAPBN 2026, target penerimaan tersebut diproyeksikan meningkat seiring pemulihan ekonomi domestik dan penguatan administrasi perpajakan. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) secara keseluruhan diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan dukungan implementasi *Coretax System*, pemanfaatan teknologi digital, serta perluasan basis pajak termasuk sektor ekonomi digital. Penerimaan PPh Migas sangat dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan volume *lifting* migas, di mana fluktuasi harga energi global menjadi faktor utama, sementara upaya pengawasan dan tata kelola sektor migas terus diperkuat untuk menjaga kontribusi terhadap APBN. Sementara itu, PPh Nonmigas diproyeksikan meningkat stabil, ditopang oleh peningkatan aktivitas ekonomi serta penerapan kebijakan perpajakan sesuai dengan amanat UU HPP, termasuk pemajakan atas transaksi lintas negara.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tetap menjadi salah satu penyumbang terbesar pajak dalam negeri, sejalan dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, aktivitas perdagangan, serta impor barang dan jasa. Pemerintah memperkuat sistem pemungutan PPN berbasis digital untuk meningkatkan kepatuhan dan menekan potensi kebocoran. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dipertahankan melalui perbaikan basis data aset, khususnya di

sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, sekaligus diarahkan mendukung tata kelola ruang dan lahan yang lebih berkeadilan. Adapun penerimaan pajak lainnya, seperti bea materai dan pajak ekspor, diproyeksikan tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas perdagangan dan optimalisasi administrasi. Dengan strategi tersebut, Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan tahun 2026 dapat terus meningkat secara berkeadilan, efisien, dan kredibel untuk memperkuat kesinambungan fiskal.

Selain itu, Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk konsisten dalam peningkatan efektivitas penagihan piutang pajak melalui penguatan sistem administrasi berbasis digital dan pengawasan terpadu.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai opsi penambahan BKC, Pemerintah tengah mengkaji secara komprehensif rencana ekstensifikasi objek cukai. Kajian diarahkan pada barang-barang yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, dengan memperhatikan daya beli masyarakat, aspek pengawasan, serta praktik internasional. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus mencapai tujuan pengendalian konsumsi.

Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai pentingnya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan serta peredaran rokok ilegal. Pemerintah telah dan akan terus memperkuat pengawasan berbasis lima pilar (*follow the goods, follow the money, follow the trader, follow the documents, dan follow the people*) untuk memastikan efektivitas pengawasan di seluruh mata rantai peredaran hasil tembakau. Selain itu, efektivitas penegakan hukum dan audit kepabeanan dan cukai juga terus ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi, analisis intelijen, dan kerja sama lintas aparat penegak hukum.

Terkait intensifikasi Cukai Hasil Tembakau (CHT), Pemerintah berkomitmen menjaga konsistensi kebijakan tarif dengan tetap berlandaskan pada empat pilar kebijakan, yaitu (1) Pengendalian konsumsi; (2) Penerimaan negara; (3) Keberlangsungan tenaga kerja; dan (4) Pengawasan rokok ilegal.

Melalui keseimbangan tersebut, diharapkan kebijakan cukai tidak hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga mendukung keberlanjutan industri hasil tembakau yang legal, sekaligus menekan ruang gerak rokok ilegal di pasar domestik.

Selanjutnya, Pemerintah terus memperkuat tata kelola kepabeanan melalui modernisasi CEISA, penguatan infrastruktur IT, serta peningkatan kompetensi dan integritas SDM. Sejalan dengan itu, kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi juga diperluas untuk mendukung kelancaran perdagangan sekaligus optimalisasi penerimaan.

Selain itu, implementasi *National Logistics Ecosystem* (NLE) terus dijalankan guna menekan biaya dan waktu logistik, serta didukung program kolaboratif Kementerian Keuangan dalam integrasi data dan pelayanan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjaga kinerja penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar sesuai target RAPBN 2026.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pertumbuhan ekspor barang dan jasa. Capaian ini mencerminkan efektivitas kolaborasi berbagai pihak dalam mempermudah proses ekspor melalui simplifikasi prosedur dan pemberian fasilitas kepabeanan.

Peningkatan ekspor jasa juga menunjukkan peluang besar diversifikasi devisa di luar komoditas fisik. Menanggapi tren global terhadap produk ramah lingkungan, Pemerintah mendukung upaya pengembangan produk hijau dalam negeri dengan terus memperkuat pelayanan ekspor dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi internasional atas produk hijau.

Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait kebijakan proaktif dan defensif guna menghadapi potensi lonjakan produk impor. Dari sisi kepabeanan, pemerintah berkomitmen memperkuat instrumen pengawasan impor melalui penerapan *early warning system*, analisis risiko, serta kerja sama lintas instansi. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan intensifikasi Bea Masuk untuk komoditas tertentu dalam mengatasi lonjakan impor yang berpotensi merugikan industri dalam negeri.

Selanjutnya, pemerintah berperan aktif dalam mendukung program hilirisasi nasional melalui fasilitas fiskal dan nonfiskal, termasuk pemberian insentif kawasan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), serta percepatan layanan ekspor. Upaya ini diharapkan dapat menjaga daya saing manufaktur nasional sekaligus memastikan industri dalam negeri mampu berkembang secara berkelanjutan baik di pasar domestik maupun global.

Pemerintah menyambut baik pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang mendukung upaya peningkatan efektivitas fasilitas kepabeanan, khususnya dalam rangka mendorong investasi, ekspor produk UMKM, serta mendukung program hilirisasi. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi sistem, serta pemberian fasilitas kepabeanan seperti Kawasan Berikat, kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), dan dukungan terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif.

Dalam mendukung UMKM, Pemerintah secara aktif memberikan asistensi ekspor melalui program-program seperti Klinik Ekspor, *Customs Visit Customer* (CVC), dan sinergi bersama instansi terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas dan menembus pasar global, sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional melalui peningkatan nilai tambah produk lokal.

Terkait peningkatan pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir, pemerintah telah dan akan terus memperkuat peran pengawasan melalui peningkatan patroli laut, pemanfaatan teknologi pengawasan modern, serta kerja sama lintas sektor,

termasuk dengan aparat penegak hukum lainnya. Fokus utama dari pengawasan ini adalah untuk mencegah penyelundupan dan peredaran barang kena cukai ilegal, serta perdagangan barang-barang terlarang yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Pemerintah menyampaikan apresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait pentingnya pengendalian belanja perpajakan (*tax expenditure*), khususnya dalam pemberian insentif fiskal. Sejalan dengan kebijakan RAPBN 2026, Pemerintah berkomitmen agar pemberian insentif perpajakan dilakukan secara lebih selektif, terukur, dan berbasis evaluasi manfaat, sehingga benar-benar mendukung sektor prioritas, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi ekonomi. Selain itu, evaluasi berkala serta koordinasi lintas K/L juga dilaksanakan agar manfaat ekonomi lebih besar dibandingkan penerimaan yang hilang.

PNBP

Terhadap pandangan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait target PNBP yang menurun pada RAPBN TA 2026 dibandingkan *outlook* tahun 2025, Pemerintah menyiapkan serangkaian strategi optimalisasi PNBP yang komprehensif, antara lain evaluasi kebijakan tarif secara berkala, perluasan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) pada komoditas strategis lainnya, serta penguatan pengawasan melalui pelaksanaan *joint program* penerimaan negara. Di sisi lain, langkah digitalisasi dan simplifikasi layanan PNBP terus diperluas melalui sistem terpadu, yang didukung pembangunan data analitik dan profil risiko pelaku usaha maupun satuan kerja, serta penguatan mekanisme penagihan melalui *Automatic Blocking System* (ABS). Dengan strategi ini, Pemerintah meyakini pengelolaan PNBP akan semakin transparan, efisien, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian nasional. Lebih lanjut, Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, serta tata kelola PNBPN agar mampu memberi nilai tambah yang lebih nyata bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Terhadap pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dan **Fraksi Partai NasDem** terkait perlunya optimalisasi Pendapatan SDA baik Migas maupun Nonmigas, melalui peningkatan nilai tambah dan penerapan tata kelola yang baik, dapat disampaikan bahwa Pemerintah sependapat dengan hal tersebut. Hal ini dilandasi oleh prinsip fundamental bahwa Sumber Daya Alam (SDA) merupakan aset strategis dan anugerah kekayaan bangsa yang wajib dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Upaya hilirisasi industri dan pengolahan hasil alam di dalam negeri tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memacu pertumbuhan industri pendukung. Selanjutnya, perbaikan tata kelola yang berorientasi pada prinsip transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan untuk memastikan keberlanjutan (*sustainability*) pengelolaan SDA, meminimalisir potensi penyimpangan, dan membangun kepercayaan publik.

Di sektor minyak dan gas bumi, Indonesia tengah menghadapi tantangan serius berupa *declining production* atau penurunan laju produksi. Fakta menunjukkan bahwa produksi dari sumur-sumur *existing* terus mengalami penurunan yang lebih cepat dibandingkan dengan penemuan cadangan baru. Kondisi ini, jika tidak diantisipasi secara strategis, akan semakin memperdalam ketergantungan pada impor minyak dan gas. Dampak lanjutannya adalah beban fiskal yang semakin berat melalui anggaran subsidi energi serta tekanan terhadap neraca perdagangan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Untuk itu, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumur *idle*, menerapkan teknologi modern seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR), *multistage fracturing*, dan *horizontal drilling*, serta mempercepat *Plan of Development* (PoD) pada sumur hasil eksplorasi. Pemerintah juga mendorong pengelolaan sumur masyarakat melalui kolaborasi dengan BUMD, koperasi, dan/ atau UMKM.

Namun demikian, Pemerintah menyadari tantangan besar yang dihadapi, mulai dari kebutuhan investasi yang signifikan hingga biaya eksplorasi yang tinggi. Oleh karenanya, penyelesaian regulasi kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional menjadi agenda penting agar iklim investasi sektor migas semakin kompetitif, transparan, dan kredibel.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait Pendapatan SDA Nonmigas yang sebaiknya tidak terlalu bergantung pada fluktuasi harga komoditas, dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus mengupayakan penguatan tata kelola melalui peningkatan sinergi semua pemangku kepentingan terkait pelaksanaan *joint business process, joint analysis, dan joint audit*. Pada sektor pertambangan mineral, Pemerintah juga akan terus memperkuat sinergi data dalam Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) sehingga penerapan *Automatic Blocking System (ABS)* dapat diperluas untuk wajib bayar di berbagai jenis sektor PNB. Pada sektor kehutanan, dalam rangka perbaikan tata kelola dan kepastian hukum dalam PNB pengelolaan kawasan hutan telah diterbitkan PP Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNB yang berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, untuk mendukung digitalisasi layanan, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas terkait PNB telah diimplementasikan antara lain SIMPONI (Sistem Informasi PNB Online), SINERGY (Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan), SIPATOK (Sistem Informasi Harga Patokan Kayu), dan SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan). Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan pemanfaatan SDA Kelautan dan Perikanan yang berbasis *Legal, Regulated, and Reported Fishing*, Pemerintah akan terus melakukan upaya digitalisasi, integrasi data dan sinergi para pemangku kepentingan pada sektor kelautan dan perikanan yang akan meningkatkan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar serta pemeriksaan PNB menjadi lebih akurat dan akuntabel. Selanjutnya pada sektor panas bumi, Pemerintah akan terus berupaya untuk menyempurnakan regulasi dan

menyederhanakan perizinan, mempercepat pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi, mempercepat Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), mengoptimalkan penguasaan dan koordinasi BUMN, serta mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha. Pemerintah juga akan terus bersinergi dengan Pemda terkait agar keberlanjutan kawasan hutan di sekitar wilayah kerja panas bumi tetap terjaga dengan baik.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Gerakan Indonesia Raya** mengenai penurunan PNBPN yang turun terutama disebabkan oleh tidak adanya setoran dividen BUMN karena bahwa pengalihan pengelolaan pendapatan setoran dividen BUMN ke BPI Danantara. Dapat disampaikan bahwa fokus kebijakan Pemerintah terkait Pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan akan diarahkan pada optimalisasi dividen BUMN yang jumlahnya terbatas dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* serta diikuti dengan perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai optimalisasi PNBPN layanan pada K/L, kami sependapat dengan pandangan tersebut bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan perbaikan tata kelola dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat melalui digitalisasi, diversifikasi, dan inovasi layanan serta penguatan sinergi, agar lebih efisien dan produktif. Untuk itu, pada tahun 2026 Pemerintah pada akan mengambil beberapa kebijakan terkait layanan K/L antara lain dengan (i) Pengembangan sistem perizinan terpadu, aplikasi layanan, serta integrasi *database* lintas sektor untuk mempercepat administrasi dan mengurangi inefisiensi; (ii) Evaluasi dan penyesuaian jenis dan tarif PNBPN serta perluasan cakupan layanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN; (iii) Pelaksanaan pengawasan PNBPN untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBPN; (iv) Optimalisasi penagihan dan memperkuat pengelolaan piutang melalui ABS PNBPN; (v) Optimalisasi penerimaan dari pengelolaan aset/BMN; dan (vi)

Peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, dan digitalisasi layanan publik. Selain itu, Pemerintah juga memberikan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0 persen sehingga pelayanan dapat diakses dan diperoleh oleh semua kalangan masyarakat, baik masyarakat tidak mampu, maupun untuk semua bentuk usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait perlunya optimalisasi pendapatan BLU melalui peningkatan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kemudahan akses layanan ke masyarakat dapat disampaikan bahwa Pemerintah akan terus melakukan perbaikan kinerja dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan produktivitas. Penguatan kebijakan BLU tahun 2026 akan diarahkan untuk transformasi BLU yang inklusif, digital, dan berkelanjutan dalam mendukung efisiensi BLU dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam rangka penguatan sinergi dan transformasi dilakukan dengan program program antara lain: (i) implementasi bagi pakai sumber daya (*shared service*) dan *link and match* antar BLU; (ii) peningkatan kualitas sumber daya pemenuhan layanan; dan (iii) pengembangan infrastruktur ramah lingkungan. Selain itu, Pemerintah juga terus meningkatkan digitalisasi layanan dan optimalisasi efisiensi keuangan BLU dilakukan melalui implementasi Sistem Informasi Terintegrasi, peningkatan kapasitas SDM serta optimalisasi proses bisnis. Untuk mendukung kebijakan peningkatan inovasi skema pembiayaan dan kemudahan akses layanan, selain mendorong kerja sama dengan sektor swasta, Pemerintah mendorong kebijakan melalui: (i) implementasi *creative financing* dalam rangka penyediaan aset untuk peningkatan kapasitas layanan BLU; (ii) akselerasi program pengembangan kawasan; dan (iii) perluasan akses pembiayaan UMKM.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait Hibah, kami sependapat bahwa Hibah diarahkan untuk mendukung prioritas nasional

seperti transformasi ekonomi berkelanjutan, percepatan penanganan *stunting*, transformasi kesehatan, penanganan perubahan iklim (*climate change*), dan pengurangan emisi di perkotaan dengan tetap memperhatikan prinsip Hibah yang tidak membebani APBN, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

C. BELANJA NEGARA

Pemerintah mengapresiasi dukungan dan pandangan **Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi PKS** terkait pengalokasian anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026. Program MBG hadir untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat tidak hanya kepada siswa peserta didik tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pemberian MBG ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran dan kesehatan bayi dalam kandungan dan balita, serta meningkatkan produktivitas penerima manfaat. Selain itu MBG juga dapat membentuk kebiasaan baik untuk makan makanan sehat dan beragam serta memperbaiki daya tahan tubuh dengan gizi yang seimbang. Dalam pelaksanaan program MBG, Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra agar program ini dapat memberdayakan UMKM lokal melalui rantai pasok penyediaan bahan makanan bergizi, menghidupkan ekonomi desa dengan melibatkan jutaan petani, nelayan, peternak dan pelaku usaha kecil sebagai penyedia pangan, serta menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi sekaligus dukungan penuh **Fraksi Partai Gerindra** terhadap komitmen Pemerintah yang telah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan di tahun 2026, dengan total anggaran sebesar Rp757,8 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kualitas pendidikan nasional guna menghasilkan SDM Indonesia yang unggul, cerdas, berintegritas dan berdaya saing serta dapat merespons berbagai tantangan pembangunan, melalui peningkatan kualitas guru, pelaksanaan MBG, Sekolah Unggul Garuda, Sekolah Rakyat, Renovasi/Revitalisasi sekolah, dan madrasah serta digitalisasi sistem pendidikan untuk pembelajaran yang adaptif dan modern

Pemerintah mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Gerindra** terhadap kebijakan ketahanan pangan. Kebijakan ketahanan pangan diarahkan utamanya

untuk mendorong produktivitas pangan, antara lain melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi alat dan sistem pertanian, serta menyediakan akses permodalan bagi petani dan nelayan.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi sekaligus dukungan penuh **Fraksi Partai Gerindra** terhadap komitmen Pemerintah yang telah mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan di tahun 2026, dengan total anggaran sebesar Rp757,8 triliun. Sejalan dengan pelaksanaan mandat konstitusi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dalam R-APBN TA 2026 direncanakan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun yang merupakan 20% dari total anggaran belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Anggaran pendidikan tersebut termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan Investasi Pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi di bidang pendidikan. Pengalokasian anggaran pendidikan yang mencakup belanja negara (belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah) dan pembiayaan, telah sejalan dengan struktur APBN yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Keuangan Negara. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan untuk kepentingan masyarakat, Pemerintah menetapkan program prioritas antara lain Sekolah Rakyat) yang didanai dari belanja Pemerintah Pusat. Selanjutnya, anggaran pendidikan sebagai pembiayaan investasi Pemerintah untuk dana abadi di bidang pendidikan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pendanaan bidang pendidikan agar dapat terus memberikan manfaat untuk generasi yang akan datang. Dapat kami sampaikan juga bahwa salah satu dukungan anggaran Pendidikan bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) melalui: (i) DAU bidang pendidikan yang utamanya untuk pembayaran gaji guru/tenaga pendidik di daerah, baik yang berstatus PNSD maupun PPPK daerah; (ii) Dana Otsus bidang pendidikan yang pemanfaatannya ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan pada bidang pendidikan di Provinsi Aceh dan Provinsi-provinsi di wilayah Papua, termasuk afirmasi pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP); dan (iii) DAK Nonfisik bidang pendidikan tetap melanjutkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan guru

melalui alokasi tunjangan guru serta dana BOSP untuk membantu pemenuhan sarana-prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah, antara lain meliputi Dana BOS bagi sekitar 43,5 juta siswa, BOP PAUD bagi sekitar 6,2 juta peserta didik, BOP Kesetaraan bagi sekitar 895 ribu peserta didik, Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND bagi sekitar 1,6 juta guru di daerah, serta Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASND bagi sekitar 22,7 ribu guru yang belum bersertifikasi.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa Pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendidikan harus menempatkan alokasi Anggaran Pendidikan pada Pos yang Direncanakan dan direalisasikan, program, dan kegiatan untuk kepentingan pendidikan bagi rakyat sehingga hak konstitusional rakyat sungguh-sungguh dipenuhi dan tidak diabaikan. Pemerintah menyadari bahwa Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk Sumber Daya Manusia menjadi pribadi yang berkualitas, adaptif serta berdaya saing ditengah kemajuan teknologi yang pesat dan dinamika global dan domestik saat ini, sehingga Pemerintah secara konsisten mengalokasikan 20 persen dari belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem** dan Sejalan dengan pelaksanaan mandat konstitusi Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dalam R-APBN TA 2026 direncanakan alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun yang merupakan 20% dari total anggaran belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun. Anggaran pendidikan tersebut termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan dan Investasi Pemerintah pada pos pembiayaan untuk dana abadi di bidang pendidikan. Pengalokasian anggaran pendidikan yang mencakup belanja negara (belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah) dan pembiayaan, telah sejalan dengan struktur APBN yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Keuangan Negara. Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan untuk

kepentingan masyarakat, Pemerintah menetapkan program prioritas antara lain Sekolah Rakyat) yang didanai dari belanja Pemerintah Pusat. Selanjutnya, anggaran pendidikan sebagai pembiayaan investasi Pemerintah untuk dana abadi di bidang pendidikan dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pendanaan bidang pendidikan agar dapat terus memberikan manfaat untuk generasi yang akan datang. Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi **Fraksi Partai NasDem** terkait penguatan akses pendidikan melalui beasiswa dan dukungan untuk keberlanjutannya. Pemerintah juga sependapat dengan **Fraksi Partai NasDem** bahwa alokasi anggaran kesejahteraan guru dan dosen perlu diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan mutu pengajar serta anggaran infrastruktur yang harus difokuskan pada pemerataan, khususnya di daerah tertinggal, terluar, terdepan agar keadilan pendidikan dapat terwujud nyata. Hal ini tercermin pada kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2026: (1) peningkatan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG); (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** agar peningkatan kualitas pendidikan, guru dan pemerataan akses pendidikan terus dilakukan. Hal ini tercermin dari kebijakan pendidikan pada RAPBN tahun 2026 yang difokuskan antara lain untuk: (1) peningkatan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) peningkatan kualitas pembelajaran

melalui Makan Bergizi Gratis (MBG); (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif. Arah kebijakan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dan terciptanya SDM Indonesia yang unggul, cerdas dan berdaya saing.

Pemerintah mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** atas program pendidikan khususnya pada penguatan program substantif baik pada program wajib belajar 13 tahun maupun program-program pendidikan tinggi. Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung terwujudnya SDM unggul yang cerdas, berintegritas dan berdaya saing yang dapat merepons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan serta mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan pendidikan pada RAPBN tahun 2026 yang difokuskan antara lain untuk: (1) peningkatan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat antara lain melalui PIP dan KIP Kuliah; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat; (3) percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya; (4) peningkatan kualitas pembelajaran melalui Makan Bergizi Gratis (MBG); (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match) antara lain melalui penguatan teaching industry dan SMK Pusat Keunggulan; (6) mendorong penguatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan (7) pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan pada beberapa K/L yang melaksanakan program-program pendidikan dimana Kementerian Agama termasuk salah satu K/L di dalamnya.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** atas peningkatan mutu pendidikan khususnya pada dana abadi pendidikan agar

memberi manfaat nyata bagi peserta didik. Anggaran Pendidikan dialokasikan melalui BPP, TKD dan pembiayaan. Anggaran Pendidikan melalui pembiayaan dialokasikan dalam pos pengeluaran pembiayaan investasi yang terdiri dari investasi pada BLU di bidang pendidikan dan pembiayaan pendidikan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran pendidikan melalui pembiayaan akan dimanfaatkan untuk pemenuhan belanja/pembiayaan prioritas di bidang pendidikan. Pemerintah akan melanjutkan investasi di bidang pendidikan diantaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Dana abadi di bidang pendidikan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi.

Pemerintah mengapresiasi pendapat **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** atas pembangunan Sekolah Unggul Garuda. Sekolah Unggul Garuda memberikan akses bagi peserta didik dari berbagai latar belakang untuk dapat mengikuti pendidikan yang berkualitas, membentuk karakter kepemimpinan dan membina peserta didik untuk dapat memiliki jiwa pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Sekolah ini akan menggunakan kurikulum yang inovatif dan mengadopsi program akademis berstandar tinggi guna menghasilkan lulusan yang berkualitas internasional dan berwawasan luas, yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan, berkontribusi dalam pembangunan nasional serta mampu bersaing secara global. Sekolah Unggul Garuda diharapkan dapat menjadi pusat untuk mengembangkan kompetensi para generasi muda berbakat, berprestasi, dan berdaya saing tinggi. Dengan memperlengkapi putra-putri terbaik bangsa dengan pendidikan yang berkualitas, program ini membuka lebih banyak peluang bagi siswa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang mengingatkan agar revitalisasi sekolah dialokasikan tepat guna dan tepat sasaran serta didukung dengan fasilitas pembelajaran modern. Program revitalisasi

sekolah dan madrasah bertujuan untuk mempercepat perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang dalam kondisi rusak di seluruh Indonesia. Program ini menjadi bukti komitmen Pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang layak dan aman sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain perbaikan gedung sekolah dan fasilitas fisik, program ini juga mengimplementasikan digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan sarana prasana digital di setiap kelas.

Pemerintah mengapresiasi dukungan atas Ketahanan Energi oleh oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat**. Dalam RAPBN Tahun 2026, kebijakan ketahanan energi diarahkan untuk: (1) peningkatan lifting migas. dengan memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif tetapi belum secara resmi ditutup, optimasi sumur-sumur produktif, dan mengeksplorasi cadangan minyak baru; (2) mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui transisi energi dalam ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel; dan (3) subsidi energi dan kompensasi lebih tepat sasaran, dengan mendorong transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis target penerima manfaat, dengan memerhatikan kondisi daya beli masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) harus mampu mengakselerasi target sertifikasi produk halal pada 2026. BPJPH menekankan untuk mencapai target tersebut melalui program utama seperti penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan kapasitas auditor dan laboratorium, digitalisasi proses melalui aplikasi SIHalal, serta subsidi sertifikasi bagi UMKM.

Pemerintah sependapat dengan pendapat **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa peningkatan layanan langsung bagi jamaah haji haruslah menjadi prioritas Pemerintah. Badan Penyelenggara Haji selaku badan perwakilan dari Pemerintah selalu melakukan terobosan seperti percepatan kontrak layanan, kolaborasi lintas pemangku kepentingan, dan kampanye sosialisasi menjadi prioritas agar penyelenggaraan haji lebih aman, nyaman, dan efisien.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, khususnya terkait pemanfaatan pembiayaan kreatif seperti skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dapat disampaikan bahwa Pemerintah sejalan dengan pandangan tersebut, mengingat kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang sangat besar tidak dapat sepenuhnya dipenuhi dari APBN. Dalam hal ini, pemerintah terus mendorong pemanfaatan skema KPBU yang dikelola secara cermat dengan dukungan fiskal berupa *Viability Gap Fund* (VGF), *Availability Payment*, maupun penjaminan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek dan menarik minat swasta. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan infrastruktur dan penyediaan kawasan permukiman yang layak, sekaligus memastikan manfaat program pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah mengapresiasi dukungan penuh **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** atas rencana anggaran bidang kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp244,0 triliun. Pemerintah akan mengoptimalkan anggaran kesehatan dimaksud untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas, dengan arah kebijakan tahun anggaran 2026 yaitu: (1) meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan; (2) peningkatan cakupan Cek Kesehatan Gratis (CKG); (3) percepatan penuntasan tuberkulosis; (4) peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan revitalisasi rumah sakit lengkap berkualitas

di daerah; (5) pemberian beasiswa serta perluasan dan pemerataan pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan; dan (6) pencegahan dan percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di berbagai wilayah Indonesia dan menjangkau seluruh rakyat Indonesia melalui arah kebijakan dan pengalokasian anggaran bidang kesehatan.

Pemerintah juga mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Gerindra** atas pemberian bantuan iuran Jaminan Kesehatan kepada 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong upaya perluasan cakupan jaminan kesehatan atau universal health coverage (UHC) demi menjamin keadilan dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah secara konsisten berupaya untuk meningkatkan akses, kualitas, dan perlindungan keuangan bidang kesehatan melalui efektivitas program Jaminan Kesehatan. Pemerintah akan menetapkan strategi kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan, termasuk terkait besaran iuran, manfaat, dan tarif layanan Jaminan Kesehatan, serta peningkatan kualitas dan kemudahan akses layanan Jaminan Kesehatan, peningkatan upaya promotif preventif, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan sistem pengelolaan klaim dan data peserta, dan penguatan peran FKTP.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem** terkait pemanfaatan anggaran kesehatan sesuai dengan prinsip *money follow program*. Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi anggaran kesehatan sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamankan pengalokasian anggaran kesehatan berdasarkan rencana induk bidang kesehatan dengan menerapkan prinsip *money follow program*, demi mencapai sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan secara berkelanjutan. Adapun dalam RAPBN 2026, Pemerintah merencanakan keberlanjutan program unggulan bidang kesehatan yang akan mendorong upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain: (1) pemberian makan bergizi, termasuk untuk ibu

hamil/menyusui dan balita sebagai upaya peningkatan pemenuhan gizi masyarakat; (2) cek kesehatan gratis bagi 130,3 juta peserta dan upaya pencegahan penyakit menular, sebagai upaya promotif preventif kesehatan; dan (3) penyediaan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah secara bertahap. Selain itu, dalam pengalokasian anggaran kesehatan, diperlukan harmonisasi anggaran pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan berkualitas dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun output anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah antara lain: (1) penguatan ±26 Puskesmas berupa pembangunan puskesmas rusak berat; (2) penguatan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendukung layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi (KJSU) dan kesehatan ibu dan anak di ±364 RSUD; (3) pemanfaatan BOK di 10.224 puskesmas, 545 daerah, dan untuk 2.169 dokter; serta (4) Program Bangga Kencana di 6.435 balai penyuluhan KB.

Pemerintah mengapresiasi dan sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Pemerintah terus mendorong peningkatan akurasi data kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini diharapkan dapat menekan *exclusion error* (masyarakat miskin yang berhak namun belum terdaftar sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan) dan *inclusion error* (masyarakat yang tidak berhak menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan namun terdaftar). Untuk itu, Pemerintah terus berupaya agar program Jaminan Kesehatan dapat menjangkau masyarakat miskin dan rentan demi mencapai cakupan kesehatan semesta yang disertai peningkatan kualitas layanan.

Terkait pemanfaatan anggaran Fungsi Kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp152,8 triliun. Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mendorong pelaksanaan upaya promotif preventif. Pemerintah mendesain anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2026 salah satunya untuk

mendorong pelaksanaan upaya promotif preventif bidang kesehatan. Penguatan promotif preventif bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat untuk mengurangi risiko kesehatan, memutus rantai penularan penyakit menular, serta mengurangi biaya pelayanan kuratif dan rehabilitatif di masa depan. Pemerintah juga akan mendorong optimalisasi anggaran Fungsi Kesehatan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pengalokasian anggaran kesehatan melalui belanja K/L dalam RAPBN sebesar Rp155,7 T. Pelaksanaan anggaran kesehatan melalui belanja K/L dilaksanakan melalui 3 (tiga) K/L utama kesehatan, yaitu Kemenkes, BPOM, dan BKKBN. Adapun K/L lainnya yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan yaitu BGN, Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan. Alokasi anggaran kesehatan melalui belanja K/L dimaksud salah satunya juga dirancang untuk melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Arah kebijakan anggaran kesehatan yang dilaksanakan melalui belanja K/L juga didesain agar pelaksanaan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi. Selain itu Polri juga telah berupaya melakukan transformasi layanan kesehatan yang dapat menghadirkan pelayanan promotif, preventif dan kuratif yang lebih merata, berkeadilan serta mudah diakses oleh seluruh Masyarakat. Secara struktur, Polri memiliki satuan pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit Bhayangkara yang tersebar dari tingkat pusat sampai daerah, disamping itu Polri juga meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam penanganan “pelayanan kesehatan” dan kegiatan “*trauma healing*” utamanya pada daerah terdampak gempa dan bencana. Selain mengalokasikan anggaran terhadap pelayanan Kesehatan dan Rumah Sakit tersebut, Polri juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung salah satu program Prioritas Nasional yaitu “Bakti Kesehatan”.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah memastikan alokasi anggaran kesehatan tidak hanya berhenti di aspek administratif tetapi juga menghasilkan peningkatan nyata dalam kualitas kesehatan di daerah terutama masyarakat miskin, terpencil, dan wilayah dengan tingkat kesehatan rendah. Dapat kami sampaikan, Pemerintah mengarahkan anggaran kesehatan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan di daerah, antara lain cek kesehatan gratis, imunisasi dasar lengkap, penanganan ibu hamil, balita gizi buruk, serta layanan penyakit menular dan tidak menular.

Pemerintah juga mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pemanfaatan TKD untuk mendukung keberlanjutan layanan kesehatan. Beberapa dukungan tersebut antara lain melalui DAK Fisik di Bidang Kesehatan yang diarahkan sesuai dengan kebijakan RKP 2026 yaitu meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan eksisting melalui pemenuhan Sarana dan Prasarana di Puskesmas, dan pemenuhan standar RS Daerah termasuk kapasitasnya sebagai layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, serta Kesehatan Ibu-Anak. Lebih lanjut, peran DAU diharapkan tetap dapat mendukung sektor prioritas pemerintah termasuk bidang kesehatan. Selain sebagai dukungan pemenuhan belanja pegawai, penggunaan DAU dapat ditujukan untuk mendukung layanan kesehatan agar memenuhi standar pelayanan minimal. Selanjutnya, Dana Otsus untuk Kesehatan dijaga baik dari sisi minimal persentase maupun dari sisi kualitas pemanfaatan melalui mekanisme evaluasi Rencana Anggaran Penggunaan Dana Otsus (RAP) dengan memastikan Dana Otsus digunakan sesuai sasaran dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) serta meminimalisir komponen belanja untuk perkantoran dan aparatur pemerintahan sehingga diharapkan Dana Otsus optimal untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar di daerah Otonomi Khusus.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pengalokasian anggaran kesehatan melalui belanja K/L dalam RAPBN

sebesar Rp155,7 T. Pelaksanaan anggaran kesehatan melalui belanja K/L dilaksanakan melalui 3 (tiga) K/L utama kesehatan, yaitu Kemenkes, BPOM, dan BKKBN. Adapun K/L lainnya yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan yaitu BGN, Kemenhan, Polri, dan Kejaksaan. Alokasi anggaran kesehatan melalui belanja K/L dimaksud salah satunya juga dirancang untuk melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Arah kebijakan anggaran kesehatan yang dilaksanakan melalui belanja K/L juga didesain agar pelaksanaan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan dengan mengedepankan optimalisasi

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem** terkait pemanfaatan anggaran kesehatan sesuai dengan prinsip money follow program. Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi anggaran kesehatan sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengamanatkan pengalokasian anggaran kesehatan berdasarkan rencana induk bidang kesehatan dengan menerapkan prinsip money follow program, demi mencapai sasaran strategis pembangunan bidang kesehatan secara berkelanjutan. Adapun dalam RAPBN 2026, Pemerintah merencanakan keberlanjutan program unggulan bidang kesehatan yang akan mendorong upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, antara lain: (1) pemberian makan bergizi, termasuk untuk ibu hamil/menyusui dan balita sebagai upaya peningkatan pemenuhan gizi masyarakat; (2) cek kesehatan gratis bagi 130,3 juta peserta dan upaya pencegahan penyakit menular, sebagai upaya promotif preventif kesehatan; dan (3) penyediaan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah secara bertahap. Selain itu, dalam pengalokasian anggaran kesehatan, diperlukan harmonisasi anggaran pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan upaya peningkatan kesehatan berkualitas dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Adapun output anggaran kesehatan melalui transfer ke daerah antara lain: (1) penguatan ±26 Puskesmas berupa pembangunan puskesmas rusak berat; (2) penguatan rumah sakit umum daerah (RSUD) untuk mendukung layanan unggulan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi (KJSU) dan kesehatan ibu dan anak di ±364

RSUD; (3) pemanfaatan BOK di 10.224 puskesmas, 545 daerah, dan untuk 2.169 dokter; serta (4) Program Bangga Kencana di 6.435 balai penyuluhan KB.

Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait komitmen Pemerintah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting. Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, arah kebijakan yang direncanakan pemerintah dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting yaitu: (1) penguatan konvergensi intervensi layanan lengkap sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran; (2) penguatan intervensi spesifik stunting melalui perilaku pemenuhan gizi yang optimal pada kelompok sasaran serta deteksi dini dan tata laksana masalah gizi dan *stunting*; (3) penguatan deteksi dini dan tata laksana masalah gizi *pra-stunting*; (4) penguatan intervensi sensitif stunting melalui pendampingan pada keluarga dengan masalah gizi *pra-stunting* dan penyelesaian akar masalah; dan (5) peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan stunting melalui kampanye nasional pencegahan stunting dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan. Pemerintah akan memperkuat upaya pencegahan penambahan jumlah kasus *stunting* baru, di samping menjaga upaya penanganan kasus stunting yang sudah ada. Dengan langkah tersebut, Pemerintah optimis pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Selanjutnya, Pemerintah juga mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pengalokasian anggaran Cek Kesehatan Gratis (CKG) dalam RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp2.594,1 miliar yang ditargetkan menjangkau 130,3 juta peserta. CKG menjadi terobosan untuk menurunkan stunting, mendeteksi penyakit lebih dini, menekan beban biaya kesehatan, serta memperkuat sistem JKN menuju ekosistem kesehatan yang adil dan efisien. Pemerintah juga akan memastikan bahwa akses dan kualitas pelaksanaan CKG merata di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, pelaksanaan CKG juga telah terintegrasi dengan layanan kesehatan primer dan rujukan melalui BPJS agar hasil CKG dapat segera ditindaklanjuti.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pengalokasian dan rencana revitalisasi rumah sakit daerah sebesar Rp2.743,7 miliar. Target revitalisasi rumah sakit pada tahun anggaran 2026 yaitu pada 10 rumah sakit yang dilaksanakan secara multi years (2025 dan 2026) dan 10 rumah sakit yang dilaksanakan pada tahun 2026. Selanjutnya, pelaksanaan revitalisasi rumah sakit tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga harus menjamin peningkatan kualitas layanan serta keselamatan pasien. Adapun pelaksanaannya tetap memprioritaskan penguatan rumah sakit di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) agar pemerataan akses dan kualitas sarana prasarana serta layanan kesehatan dapat menjangkau berbagai daerah. Selain itu, berbagai program afirmatif terus diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan rujukan, mengurangi disparitas antarwilayah, dan memastikan setiap masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkeadilan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi, harus disertai dengan pelaksanaan yang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatsasaran penerima manfaat, mulai tahun 2025 melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Pemerintah memanfaatkan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Hal ini untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi.

Pemerintah menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa alokasi Fungsi Pertahanan pada RAPBN tahun 2026 meningkat bila dibandingkan

dengan outlook tahun 2025 namun terdapat penyesuaian alokasi penguatan alutsista. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat postur pertahanan nasional melalui pendekatan *Optimum Essential Force* (OEF) termasuk pemeliharaan alutsista, penambahan batalyon dan kodam, serta penguatan komponen cadangan. Untuk mencapai kemampuan pertahanan negara yang ideal, Pemerintah akan terus berkomitmen dalam penguatan militer yang mencakup teknologi modern dan kesiapan personel dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Fungsi Pertahanan tahun 2026, yaitu pemenuhan dan modernisasi alutsista serta pembangunan dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah juga sependapat bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pengadaan alutsista, Pemerintah akan menggunakan skema yang tepat dan sesuai kemampuan keuangan negara karena pengadaan alutsista bersifat jangka panjang, disesuaikan dengan kebutuhan teknis, dan memerlukan kepastian pendanaan lintas tahun.

Pemerintah mengapresiasi atas pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah untuk selalu memperhatikan kesejahteraan dan kualitas SDM bagi prajurit TNI/anggota Polri terutama bagi prajurit TNI/anggota Polri yang telah mengabdikan diri di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah juga sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait penguatan keamanan siber yang menjadi pilar utama pertahanan dan keamanan nasional. Kini, ancaman siber nasional di Indonesia semakin kompleks dan mengkhawatirkan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital dan adopsi teknologi baru. Untuk menghadapi ancaman tersebut yang semakin kompleks dan masif, Indonesia telah mengembangkan berbagai strategi dan kebijakan yang mencakup pendekatan teknis, regulatif, dan kolaboratif melalui arah kebijakan Fungsi Ketertiban dan Keamanan tahun 2026, antara lain penguatan alat dan sistem keamanan negara dan penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus mendorong agar sektor ini mendapatkan perhatian yang lebih strategis.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem** yaitu dalam menetapkan 10 bidang prioritas harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur sehingga transformasi sosial, ekonomi dan politik sebagai basis yang utuh dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat terjadi. Pertahanan Semesta merupakan implementasi UUD 1945 Pasal 30 dan amanat UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman/gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sejalan dengan hal tersebut, misi Kabinet Merah Putih telah memasukan Pertahanan Semesta ke dalam Asta Cita kedua yang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan untuk mengurangi ketergantungan impor, energi dan air yang dapat menjamin keberlanjutan sumber daya, ekonomi kreatif dan hijau mendorong inovasi dan keberlanjutan, serta ekonomi biru yang memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal - hal di atas, maka output Pertahanan Semesta tahun 2026 direncanakan antara lain untuk pengadaan/harwat alutsista strategis, pengadaan/harwat/peningkatan non-alutsista, pembangunan/pengadaan sarana prasarana pertahanan dan keamanan, dan penguatan kapasitas industri pertahanan, serta penguatan komponen utama, cadangan dan pendukung termasuk penambahan batalyon dan Komando Daerah Militer (Kodam). Selain itu, Pemerintah tetap berupaya memperhatikan kualitas SDM maupun kesejahteraan prajurit TNI/Polri sebagai garda terdepan dalam mengemban tugas pertahanan dan keamanan bangsa dan negara.

Pemerintah mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terhadap program pembangunan ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama Pemerintah dalam RAPBN TA 2026 untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa. Anggaran ketahanan pangan dalam RAPBN 2026

sebesar Rp164,4 triliun diarahkan untuk mendorong produktivitas pangan, menjaga stabilitas harga pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Untuk mendorong produktivitas pangan, Pemerintah akan fokus pada program prioritas penguatan lumbung pangan antara lain melalui: (1) cetak sawah untuk memperluas cakupan pertanian; (2) optimasi lahan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang ada; (3) penyaluran bantuan alsintan, seperti traktor, mesin tanam padi, mesin penabur benih, dan pompa; (4) bantuan sarana pertanian, seperti benih, pupuk, dan pestisida; dan (5) pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung pertanian, meliputi jaringan irigasi dan bendungan di area strategis. Selanjutnya, Pemerintah akan terus memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat, utamanya melalui penguatan cadangan pangan dengan melibatkan peran Perum BULOG. Dalam hal ini, Pemerintah menyediakan dukungan investasi bagi Perum BULOG untuk menyerap produksi dari petani dalam negeri, sehingga diharapkan mampu menjaga pasokan pangan di pasar dan stok cadangan pangan pemerintah, mewujudkan stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen, sekaligus mengurangi ketergantungan impor beras. Selanjutnya, Pemerintah berupaya untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi pangan, terutama di daerah rentan rawan pangan. Kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi perhatian Pemerintah. Kebijakan yang akan ditempuh untuk meringankan beban sekaligus mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani, antara lain penyaluran bantuan sarana pertanian seperti pupuk bersubsidi secara tepat sasaran, serta perlindungan usaha seperti asuransi usaha tani.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi PKS** bahwa dukungan anggaran prioritas bidang ketahanan pangan harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur baik output maupun outcome. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan anggaran ketahanan pangan diikuti dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan, seperti produktivitas padi naik dari 52,26 ku/ha di tahun 2021 menjadi 52,90 ku/ha di tahun 2024 dan produktivitas jagung naik dari

57,62 ku/ha di tahun 2021 menjadi 59,40 ku/ha di tahun 2024. Produksi beberapa komoditas pangan juga meningkat, seperti daging ayam ras pedaging naik dari 3,19 juta ton di tahun 2021 menjadi 3,84 juta ton di tahun 2024, dan telur ayam petelur naik dari 5,16 juta ton di tahun 2021 menjadi 6,34 juta ton di tahun 2024. Hal ini juga disertai dengan perbaikan Nilai Tukar Petani (NTP) dari 108,34 di tahun 2021 menjadi 122,78 di tahun 2024. Alokasi anggaran ketahanan pangan pada RAPBN TA 2026 juga disusun dengan berorientasi pada sasaran output dan outcome yang mendukung prioritas Pemerintah, antara lain peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, peningkatan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas keamanan pangan, pengendalian harga komoditas pangan pokok, serta peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi anggaran secara berkala untuk memastikan anggarannya efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Demokrat** terkait penetapan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai indikator baru yang lebih komprehensif dalam mengukur kesejahteraan rumah tangga petani, dengan target 0,7731 pada tahun 2026. Kebijakan peningkatan kesejahteraan petani diarahkan utamanya untuk penguatan daya beli dan pendapatan petani, antara lain melalui berbagai program dukungan sarana dan prasarana produksi, akses pembiayaan, serta perlindungan sosial yang lebih adaptif. Program dukungan sarana dan prasarana produksi meliputi penyaluran bantuan alsintan, benih, pestisida, pupuk bersubsidi, dan sarana lainnya secara merata dan lebih tepat sasaran, hingga pembangunan infrastruktur dasar pertanian seperti jaringan irigasi, bendungan, dan jalan usaha tani. Adapun dukungan akses pembiayaan dan perlindungan usaha bagi petani antara lain program KUR alsintan dan asuransi usaha tani padi. Hal ini didukung pula oleh penguatan kapasitas petani terhadap sistem pertanian yang berkelanjutan, serta penguatan rantai pasok dan distribusi pangan yang efektif. Selain dari segi penguatan daya beli dan pendapatan, Pemerintah memastikan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, standar hidup layak, dan

ketahanan pangan bagi rumah tangga petani melalui bauran kebijakan dalam program bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** program bidang ketahanan pangan dan keterkaitannya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ketahanan pangan yang utamanya diarahkan untuk meningkatkan produksi pangan dapat mendukung pemenuhan bahan pangan program MBG, seperti beras, daging, ikan, dan susu. Program MBG juga dapat mendukung penyerapan produksi pangan dari petani lokal sehingga bisa sekaligus mengangkat kesejahteraan petani. Selain itu, Program MBG yang bertujuan untuk peningkatan akses dan pemenuhan makanan bergizi searah dengan konsep ketahanan pangan, yaitu bukan hanya terpenuhinya pangan dari segi jumlah namun juga mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Dengan demikian, program ketahanan pangan dan program MBG merupakan wujud sinergi program dan bauran instrumen penting untuk menghasilkan *cost of effectiveness* dalam mendukung program prioritas.

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait pembaharuan data kemiskinan seiring dengan perubahan angka *Purchasing Power Parity* (PPP), dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam mengukur garis kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan *Cost of Basic Needs* (CBN), mencakup kebutuhan makanan (setara 2.100 kkal per orang per hari) dan non-makanan (perumahan, kesehatan, pendidikan, pakaian, transportasi). Perhitungan berbasis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), merepresentasikan pengeluaran rumah tangga yang disesuaikan dengan perkembangan harga dan dilakukan 2 kali setahun (Maret dan September). Nilainya juga berbeda antarwilayah, misalnya jauh lebih tinggi di DKI Jakarta dibandingkan NTT karena variasi harga dan pola konsumsi. Pemerintah sepakat bahwa diperlukan pemutakhiran sehingga mampu memberikan pijakan dalam merumuskan kebijakan dengan lebih akurat. Pemerintah juga sepakat bahwa

diperlukan intervensi pemerintah dalam menjaga daya beli rumah tangga secara keseluruhan. Pemerintah Pusat bersinergi dengan Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam kerangka Tim Pengedalai Inflasi memastikan bahwa stabilisasi harga terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu gejolak harga. Program perlindungan sosial harus didesain agar memberikan peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk graduasi dan kesejahteraan meningkat. Sehingga, perlindungan sosial harus diarahkan meningkatkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan hidup layak). Skema graduasi merupakan mekanisme yang dipergunakan oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa program perlindungan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi bergerak ke arah transformasi sosial-ekonomi. Konsep ini menandai tahapan di mana penerima manfaat keluar dari program secara terencana karena telah mencapai tingkat kesejahteraan atau kapasitas tertentu. Sebagai strategi utama dalam mendorong graduasi dan kemandirian penduduk, Pemerintah saat ini melaksanakan program pelatihan keterampilan produktif dan penguatan kewirausahaan, akses pembiayaan mikro, serta pendampingan intensif yang berkelanjutan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa pelaksanaan kebijakan anggaran untuk perlindungan sosial dan subsidi, harus disertai dengan pelaksanaan yang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatsasaran penerima manfaat, mulai tahun 2025 melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, Pemerintah memanfaatkan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi. Hal ini untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memerlukan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang akurat dan terintegrasi.

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait peningkatan anggaran fungsi perlindungan sosial dapat disampaikan sebagai berikut. Fungsi perlindungan sosial merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pada RAPBN tahun anggaran 2026, anggaran Fungsi Perlindungan Sosial direncanakan sebesar Rp279.541,6 miliar atau meningkat sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan outlook tahun anggaran 2025. Melalui anggaran tersebut, pemerintah berharap agar anggaran fungsi perlindungan sosial tersebut dapat optimal dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan dari risiko sosial serta meningkatkan pemberdayaan perempuan dan keterlibatannya dalam pembangunan. Adapun beberapa output pada Fungsi Perlindungan Sosial tahun 2026 antara lain dimanfaatkan untuk bantuan pangan/kartu sembako, bantuan tunai bersyarat melalui program PKH, bantuan permakanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan, korban penyalahgunaan NAPZA, ODHIV, anak, yatim piatu (YAPI), penyandang disabilitas dan lanjut usia, bantuan rehabilitasi rumah, pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), pemberian bimbingan teknis tentang kewirausahaan, pemberian layanan tingkat nasional bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) korban kekerasan, pemberian layanan rujukan akhir bagi Perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyaluran subsidi bunga kredit perumahan dan bantuan uang muka perumahan; serta pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN/TNI/Polri baik aktif maupun pensiunan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** atas pemanfaatan belanja negara untuk menjaga masyarakat dari ancaman penurunan daya beli, pengangguran dan kemiskinan ekstrim dalam RAPBN tahun 2026, dapat disampaikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp508,2 T, meningkat 8,6 persen apabila dibandingkan dengan

outlook tahun 2025. peningkatan ini merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman penurunan daya beli, mengurangi tingkat pengangguran, dan menghapuskan kemiskinan ekstrem. oleh karena itu, Oleh karena itu, untuk memperkuat strategi pengentasan kemiskinan agar dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, pemerintah akan menempuh kebijakan anggaran perlintsos tahun 2026 antara lain: (1) meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan DTSEN; (2) pelaksanaan penyaluran bansos yang terintegrasi serta sinergi dengan program pemberdayaan; (3) mendorong kemandirian ekonomi melalui akses permodalan, pelatihan, pendampingan usaha dan kemitraan; serta (4) mendorong perlindungan sosial adaptif dan inklusif.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait komitmen Pemerintah dalam melanjutkan Program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang layak dan berkualitas serta mempersiapkan peserta didik yang memiliki daya saing sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Sekolah Rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya, tanpa terkendala oleh latar belakang ekonomi atau sosial mereka. Sekolah Rakyat akan mengintegrasikan tiga aspek utama yaitu pendidikan formal, keterampilan hidup dan pemberdayaan ekonomi melalui kurikulum vokasional. Keberadaan asrama diharapkan dapat menjadi lingkungan yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter dan kepribadian luhur sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan gratis tetapi juga terpenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa perlu perhatian lebih bagi sektor pariwisata. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Badan Ekonomi Kreatif) menempuh beberapa langkah antara lain: digitalisasi total proses layanan dan pemasaran (*Tourism 5.0, big-data marketing, e-Registration*); penetapan

target kunjungan dan pemantauan capaian secara berkala; peningkatan kapasitas SDM lewat pelatihan *hospitality* dan sertifikasi profesi; program pembinaan UMKM kreatif serta desa wisata. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi pariwisata terhadap PDB, menahan fluktuasi musiman, serta meningkatkan daya saing produk wisata nasional

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait penggunaan anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp193,95 triliun, dapat disampaikan bahwa anggaran tersebut utamanya direncanakan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp177,12 triliun dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp12,64 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah menetapkan beberapa bentuk program/jaminan yang harus diselenggarakan oleh pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) antara lain dimanfaatkan untuk jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, Jaminan pensiun dan jaminan kematian. Selain itu, UU SJSN tersebut dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial yang bertujuan agar pelaksanaan program SJSN dapat lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan inklusif.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait optimalisasi belanja pegawai untuk peningkatan kualitas layanan publik. Pemerintah terus berkomitmen melanjutkan dan memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang agile, efektif, dan efisien sehingga tercapai kualitas pelayanan publik yang semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk menuju sasaran tersebut, kualitas dan kompetensi ASN perlu terus ditingkatkan sehingga tercipta ASN yang profesional dan berintegritas. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya untuk mendorong digitalisasi di pemerintahan

sehingga pelayanan yang diberikan dapat semakin efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui upaya-upaya tersebut, langkah reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pelayanan Publik (IPP) nasional mengalami peningkatan dari 3,79 pada tahun 2021 menjadi 4,07 pada tahun 2024. Berdasarkan *Government Effectiveness Index* (GEI), kualitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan di Indonesia juga semakin meningkat, dari skor 0,346 pada tahun 2021 menjadi 0,580 pada tahun 2023. Selain itu, pada tahun 2024, *E-Government Development Index* (EGDI) Indonesia juga melampaui rata-rata negara *upper middle income*, dengan skor 0,79 (kategori *Very High* EGDI), mengindikasikan penerapan digitalisasi pemerintahan yang terus membaik. Dalam EGDI tersebut, indeks pelayanan *online* di Indonesia membaik dari 0,76 di tahun 2022 menjadi 0,80 di tahun 2024 serta indeks infrastruktur telekomunikasi juga meningkat dari 0,64 (2022) menjadi 0,86 (2024), menunjukkan semakin matangnya digitalisasi pemerintahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Indonesia yang didukung dengan digitalisasi telah berada dalam jalur yang tepat dan akan terus diperkuat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa alokasi anggaran di sektor penegakan hukum harus lebih fokus pada program penegakan yang berdampak langsung pelayanan hukum kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan anggaran Kejaksaan RI dalam RAPBN TA 2026 dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Pengadilan Negeri melalui kegiatan layanan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri, mendukung operasi penanganan dan penyelesaian pemulihan aset yang terkait perkara, memberikan rekomendasi kebijakan evaluasi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restorative, dan mendukung prioritas lainnya melalui kegiatan penanganan perkara. Dengan anggaran program penegakan hukum dan pelayanan publik lebih besar, sehingga berarti anggaran belanja birokrasi semakin efisien. Demikian halnya dengan Polri, kebijakan strategis pada tahun 2026 antara lain untuk mewujudkan kualitas

pelayanan publik yang semakin inovatif berbasis digital, menegakkan hukum secara adil, transparan, sesuai legal, dan humanis berdasarkan *Scientific Criminal Investigation* (SCI), mewujudkan pengelolaan SDM yang modern dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang sehat, cerdas, berintegritas dan profesional, mengembangkan Almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis *Minimum Essential Police Equipment* (MEPE), serta meningkatkan budaya integritas, akuntabilitas dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian. Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengembangkan strategi pemberantasan kejahatan yang lebih terintegrasi antarinstansi pemerintahan, yaitu Polri, KPK, PPATK dan BSSN guna mengantisipasi perubahan pola kejahatan dari konvensional ke ranah kejahatan siber/digital. Sejalan dengan hal di atas, anggaran Kementerian HAM pada RAPBN TA 2026 dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai HAM kepada masyarakat dan pelaku usaha diantaranya melalui pembentukan desa sadar HAM, kampung rekonsiliasi dan perdamaian (REDAM), penyebarluasan nilai-nilai HAM dengan perluasan pendidikan, sosialisasi, pembuatan konten kreatif, iklan dan lainnya, serta penanganan pengaduan/isu aktual dugaan pelanggaran HAM dan tindak lanjut Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian NonYudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Untuk itu, Pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk mendorong integrasi antarinstansi peradilan antara lain MA, Kejaksaan RI, Komisi Yudisial, KPY, Komnas HAM, dan LPSK agar tercipta budaya hukum dan kesadaran hukum yang kuat di masyarakat sesuai dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Sejalan dengan LPSK, anggaran untuk program penegakan hukum dan pelayanan publik mendapat alokasi lebih besar agar memperkuat kapasitas LPSK dalam memberikan perlindungan saksi dan korban. Kebijakan strategis pada tahun 2026 antara lain dimanfaatkan untuk penyusunan kajian *grand design innovative financing* untuk perlindungan, pemulihan saksi dan korban serta cetak biru pengembangan sistem informasi

layanan terpadu perlindungan saksi dan korban berbasis teknologi informasi, memperkuat posisi LPSK dalam jejaring perlindungan saksi dan korban, mengembangkan sistem perlindungan yang holistik dan integratif, mewujudkan transformasi kelembagaan yang lincah dan kokoh, menguatkan dan menegakkan perlindungan terhadap saksi dan korban, serta melindungi dan memenuhi hak-hak pembela HAM dan kelompok rentan. Sejalan juga dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kementerian Imipias) mengutamakan anggaran dalam RAPBN TA 2026 untuk program penegakan hukum dan pelayanan publik secara signifikan. Kementerian Imipias melakukan transformasi digital dan reformasi hukum yang fokus pada SPBE, paspor elektronik, dan AI untuk efisiensi dan pengawasan, serta restorative justice dan pembangunan Lapas Modern di daerah terpencil sebagai bagian dari reformasi hukum. Kementerian Imipias berupaya untuk melakukan peningkatan pelayanan publik yang efisien dan perlindungan hukum berlandaskan prinsip keadilan, keadilan restoratif dan kepuasan masyarakat serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berkelanjutan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** terkait peningkatan gaji ASN, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah senantiasa berupaya menjaga tingkat kesejahteraan ASN dan TNI/Polri, melalui pengalokasian dan pembayaran gaji dan tunjangan pada setiap Kementerian Negara dan Lembaga, termasuk pemberian Gaji ke-13 dan THR. Perhatian Pemerintah di atas sejalan dengan kebijakan Belanja Pegawai, yaitu antara lain mendorong efektivitas dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Demokrat** agar Belanja Barang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat. Belanja Barang pada RAPBN tahun 2026 lebih

tinggi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja barang ini diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Kabinet Merah Putih, antara lain untuk makan bergizi gratis (MBG), ketahanan pangan dan energi, pendidikan dan kesehatan berkualitas, dan pertahanan semesta. Selain itu, anggaran Belanja Barang pada RAPBN TA 2026 mempunyai manfaat strategis antara lain untuk peningkatan kualitas layanan publik, revitalisasi rumah sakit dan sekolah, termasuk penciptaan lapangan kerja pada sektor-sektor padat karya, seperti pengadaan alat pertanian modern dan pencetakan sawah, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi desa melalui pengadaan barang dan distribusi logistik. Disamping manfaat tersebut, Presiden telah menekankan agar belanja barang tetap efisien, efektif, transparan dan tepat sasaran sehingga belanja operasional yang kurang produktif akan dialokasikan pada anggaran prioritas agar setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang nyata. Anggaran belanja barang juga mendukung pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah tertinggal antara lain melalui pengadaan barang untuk layanan dasar dan bantuan pemerintah yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai NasDem** terkait pemanfaatan anggaran di bidang ketenagakerjaan secara efektif untuk prioritas program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan. Sejalan dengan hal tersebut, anggaran Kementerian Ketenagakerjaan difokuskan untuk pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan, sertifikasi, perluasan kesempatan kerja, transformasi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan, serta pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan. Peningkatan keterampilan tenaga kerja juga terus diperkuat melalui pendidikan vokasi berbasis industri 4.0 dan 5.0. Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan program *link and match* yang menghubungkan pendidikan

vokasi dengan dunia kerja sehingga lulusan sekolah vokasi dapat menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah berterima kasih atas apresiasi dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan akan terus berkomitmen dalam pengelolaan anggaran yang efisien, efektif, dan akuntabel untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DTSEN merupakan inisiatif strategis Pemerintah untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat diandalkan dalam pengelolaan program sosial dan bantuan pemerintah. Dengan memanfaatkan DTSEN, Pemerintah dapat lebih efektif dalam menyalurkan berbagai bansos, subsidi, dan program pemberdayaan masyarakat, serta memastikan bahwa bantuan tersebut tepat sasaran serta dapat menghindari tumpang tindih dengan program bantuan lainnya atau program prioritas lainnya.

Pemerintah mengapresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa 10 bidang prioritas harus disertai dengan indikator kinerja yang terukur. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam setiap rincian RKA-K/L (antara lain termasuk untuk beberapa Kementerian/Lembaga yang terkait langsung dengan pelaksanaan 10 bidang prioritas) juga dilengkapi dengan sistem informasi kinerja dengan tujuan agar output/keluaran yang dihasilkan dapat dipastikan berkorelasi dan mendukung pencapaian sasaran/outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, informasi kinerja ini juga akan menjadi referensi untuk pelaksanaan evaluasi kinerja penganggarannya. terkait indikator kinerja Prioritas Bidang Ketahanan Energi, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pada RAPBN tahun 2026, Pemerintah memberikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi antara lain berupa insentif perpajakan, infrastruktur energi, energi baru terbarukan, subsidi energi dan kompensasi. Adapun output dari dukungan fiskal tersebut antara lain berupa pemberian bantuan converter kit kepada petani, pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan, pembangunan transmisi pipa gas bumi,

insentif biodiesel, dan penyaluran subsidi energi dan kompensasi. Pemanfaatan dukungan fiskal untuk ketahanan energi pada tahun 2026 tersebut akan diarahkan untuk peningkatan *lifting* migas, stabilisasi harga, dan pengembangan EBT.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** atas pembangunan infrastruktur yang harus dioptimalkan, dapat disampaikan bahwa dalam RAPBN 2026, dalam pos Investasi non Permanen, Pemerintah mengalokasikan Pembiayaan Investasi untuk pembiayaan FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk penyediaan infrastruktur perumahan. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi untuk mendukung kelanjutan pendanaan pengadaan tanah untuk PSN.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrat**, bahwa pembangunan infrastruktur harus dioptimalkan. Hal tersebut sejalan dengan Prioritas Nasional ke-3 dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026 yaitu "Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi". Strategi kebijakan Pemerintah dalam RAPBN tahun 2026 yang dilakukan melalui berbagai bidang prioritas pembangunan, diantaranya Program 3 Juta Rumah, dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi. Melalui Program 3 juta rumah untuk rakyat, Pemerintah telah menyiapkan beberapa skema pendanaan pembiayaan perumahan salah satunya melalui BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni (RTLH) dan meningkatkan kualitas hunian yang lebih aman dan sehat terutama untuk masyarakat desa, kota, dan kawasan pesisir. Program BSPS dilakukan dengan memberikan bantuan berupa stimulan (dorongan) untuk melakukan pembangunan atau renovasi rumah secara swadaya yang sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan dalam penyediaan perumahan yang layak. Melalui

pembangunan infrastruktur konektivitas yang terintegrasi antar daerah, Pemerintah terus berupaya menyediakan dan meningkatkan prasarana transportasi dibidang konektivitas darat, laut, udara, dan perkeretaapian dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan layanan angkutan konektivitas. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas didaerah terpencil, mengurangi kesenjangan antar daerah, mengurangi biaya logistik, mendorong investasi, dan membuka lapangan kerja yang pada akhirnya dapat mendorong pemerataan pembangunan dan wilayah.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait penurunan belanja modal dapat disampaikan bahwa, *outlook* belanja modal telah memperhitungkan tambahan pagu untuk pelaksanaan program prioritas Presiden diantaranya, pembangunan sekolah rakyat, renovasi/revitalisasi sekolah dasar dan menengah (termasuk madrasah), pembangunan infrastruktur energi (migas), prasarana jaringan irigasi yang mendukung ketahanan pangan, serta penguatan sarpras bidang hankam (pertahanan semesta). Pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas belanja modal dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan menuju kemandirian ekonomi dan penguatan daya saing. Sejalan dengan hal tersebut, alokasi belanja modal dalam RAPBN tahun 2026 sebesar Rp274,18 triliun tetap mengalami peningkatan dibanding APBN 2025 sebesar Rp234,11 triliun. Peningkatan tersebut sejalan dengan arah kebijakan belanja modal tahun 2026 diantaranya untuk mendukung pembangunan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing dan berkualitas, serta mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, jaringan konektivitas, dan swasembada air.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait penggunaan anggaran Program Pengelolaan Transaksi Khusus pada RAPBN tahun anggaran 2026 sebesar Rp193,95 triliun, dapat disampaikan bahwa anggaran tersebut utamanya direncanakan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun

sebesar Rp177,12 triliun dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN/TNI/Polri oleh Pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp12,64 triliun.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** atas Program Pengelolaan belanja Lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut: Pada RAPBN 2026 dialokasikan sebesar Rp525,6 triliun yang akan di arahkan antara lain untuk: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; serta (4) dukungan pembayaran kewajiban Pemerintah, antara lain kompensasi harga BBM dan listrik.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang memandang pentingnya pembentukan Koperasi Kelurahan/Desa Merah Putih (KKMP/KDMP) sebagai tulang punggung dan instrumen penguatan ekonomi rakyat, utamanya di pedesaan. Pembentukan KKMP/KDMP didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu. Identifikasi bidang usaha KKMP/KDMP dapat memanfaatkan pemetaan potensi desa. Selanjutnya, semangat gotong royong dalam KDMP ditandai dengan diwajibkannya persetujuan pembentukan KDMP melalui musyawarah desa, yang di dalamnya membahas skema usaha yang relevan. Dengan target 80 ribu KKMP/KDMP yang tersebar di seluruh Indonesia, Pemerintah berusaha menjangkau seluruh desa dan kelurahan melalui pembentukan koperasi baru maupun pengembangan dan revitalisasi koperasi yang sudah ada. Bidang usaha yang dijalankan koperasi meliputi bidang yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan potensi desa, antara lain gerai sembako, gerai obat murah/apotek desa, gerai klinik desa, gerai kantor

koperasi, gerai unit simpan pinjam, gerai pergudangan dan logistik, gerai usaha lain misalnya pupuk bersubsidi. Program pembangunan desa, koperasi, dan UMKM merupakan salah satu upaya pencapaian target penurunan kemiskinan. Pembangunan di desa akan difokuskan pada peningkatan status desa, peningkatan pendapatan dan produktivitas petani, nelayan, dan peternak, dan penguatan ketahanan pangan di desa. Sementara itu, pengembangan koperasi dan UMKM desa bertujuan untuk meningkatkan akses modal produktif dan meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional. Selain itu, kondisi pelayanan publik di desa terutama infrastruktur dasar pendidikan dan kesehatan yang baik juga akan berperan dalam penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin dan peningkatan produktivitas. Investasi di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan juga diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas ekonomi perdesaan.

Pemerintah mengapresiasi dukungan atas Ketahanan Energi oleh **Fraksi Partai Golongan Karya**. Dalam RAPBN Tahun 2026, kebijakan ketahanan energi diarahkan untuk: (1) peningkatan lifting migas dengan memanfaatkan sumur-sumur migas yang sudah tidak aktif tetapi belum secara resmi ditutup, optimasi sumur-sumur produktif, dan mengeksplorasi cadangan minyak baru; (2) mempromosikan EBT untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan menyediakan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui transisi energi dalam ekosistem ketenagalistrikan dan pengembangan program biodiesel; dan (3) subsidi energi dan kompensasi lebih tepat sasaran, dengan mendorong transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi yang berbasis target penerima manfaat, dengan memerhatikan kondisi daya beli masyarakat.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** atas peningkatan Belanja Non K/L, khususnya alokasi Program Pengelolaan Utang sebesar Rp599,44 triliun dalam RAPBN TA 2026, dapat kami sampaikan bahwa kenaikan alokasi tersebut merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan pembiayaan

utang dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada masa pandemi Covid-19. Saat itu, pembiayaan utang digunakan untuk menopang APBN agar tetap berfungsi sebagai instrumen penyelamat perekonomian, di tengah aktivitas ekonomi yang terhenti dan penerimaan pajak yang menurun tajam. Utang menjadi instrumen penting untuk mendukung penanganan kesehatan, program pemulihan ekonomi nasional, serta perlindungan masyarakat. Peningkatan alokasi bunga utang ini sekaligus mencerminkan konsistensi dan komitmen Pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang secara penuh, tepat waktu, tepat jumlah, dan terukur. Kredibilitas tersebut menjadi kunci dalam menjaga *sovereign rating* Indonesia tetap pada *level investment grade*, yang pada gilirannya menekan biaya pembiayaan dan memperkuat kepercayaan investor. Ke Depan, Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk terus mengelola utang secara *prudent*, sehingga biaya pembiayaan tetap efisien dengan risiko yang terkendali.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa BPI Danantara dibentuk untuk mempercepat investasi dan perdagangan global, BPI Danantara menjadi driver pendorong investasi produktif dengan terus memperkuat peran Indonesia dalam global value chain. Terkait dengan tata kelolanya, sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, antara lain telah diatur bahwa: (1) pengelolaan aset BPI Danantara sepenuhnya dilakukan oleh organ Badan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan, dan (2) pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPI Danantara dilakukan oleh BPK.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait subsidi energi tepat sasaran, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam RAPBN 2026, salah satu arah kebijakan subsidi energi adalah transformasi subsidi energi agar semakin tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Selama ini, subsidi energi sering kali dinikmati secara tidak proporsional

oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga manfaatnya kurang optimal bagi kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang seharusnya lebih berhak. Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan reformasi mendasar dalam penyaluran subsidi energi, dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Transformasi ini bertujuan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. Dengan pendekatan berbasis data yang lebih akurat dan pemanfaatan teknologi digital, penyaluran subsidi dilakukan secara lebih transparan, terukur, serta mengurangi potensi kebocoran dan penyalahgunaan.

Pada RAPBN tahun 2026, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan; (2) melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunaannya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya; dan (3) melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam DTSEN. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2026 adalah untuk: (1) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu (DTSEN) disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak.; dan

(2) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

Menanggapi pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait subsidi energi tepat sasaran, dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam RAPBN 2026, salah satu arah kebijakan subsidi energi adalah transformasi subsidi energi agar semakin tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Selama ini, subsidi energi sering kali dinikmati secara tidak proporsional oleh kelompok masyarakat mampu, sehingga manfaatnya kurang optimal bagi kelompok rentan dan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang seharusnya lebih berhak. Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan reformasi mendasar dalam penyaluran subsidi energi, dengan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Transformasi ini bertujuan untuk memastikan subsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. Dengan pendekatan berbasis data yang lebih akurat dan pemanfaatan teknologi digital, penyaluran subsidi dilakukan secara lebih transparan, terukur, serta mengurangi potensi kebocoran dan penyalahgunaan.

Pada RAPBN tahun 2026, Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg diarahkan untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM Solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah. Kebijakan ini disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan; (2) melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan registrasi konsumen penggunaannya. Dalam rangka memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan

koordinasi antar K/L dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait lainnya; dan (3) melanjutkan upaya transformasi subsidi LPG Tabung 3 kg tepat sasaran menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat. Kebijakan tersebut antara lain dilakukan dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi sehingga pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna yang telah terdata dan tercantum dalam DTSEN. Pelaksanaan transformasi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2026 adalah untuk: (1) subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai dengan data terpadu (DTSEN) disertai dengan penyesuaian tarif (tariff adjustment) untuk pelanggan non subsidi. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya peningkatan ketepatan sasaran agar subsidi diberikan kepada rumah tangga yang berhak.; dan (2) mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi dampak emisi melalui penerapan pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Hal ini dilakukan khususnya dengan transisi energi dari pemanfaatan energi yang berbasis fosil menuju EBT. Kebijakan ini perlu dilakukan dengan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek khususnya kondisi sektor ketenagalistrikan dan kemampuan fiskal.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional** agar Pemerintah memastikan adanya alokasi program dan anggaran yang efektif agar pembangunan seluruh daerah terjaga serta tidak terjadi ketimpangan layanan publik antardaerah. Skema pengalokasian program pembangunan di daerah yang merata dilakukan melalui kombinasi Belanja Pemerintah Pusat, Transfer ke Daerah, APBD, serta instrumen pendanaan lainnya sesuai peraturan perundangan. Dalam mendukung efektivitas pembangunan di seluruh wilayah daerah, Pemerintah akan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut: (1) perencanaan terpadu nasional-daerah, di mana pemerintah pusat

menggunakan RPJMN dan RKP sebagai acuan pembangunan sementara daerah menyusun RPJMD dan RKPD yang harus selaras dengan RPJMN dan RKP, selanjutnya dilakukan sinkronisasi melalui forum Musrenbang agar program pusat dan daerah selaras dan tidak tumpang tindih; (2) TKD sebagai instrumen pemerataan, di mana DAU dialokasikan berdasar kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal, DAK dialokasikan untuk sektor prioritas dan memastikan daerah 3T juga mendapatkan layanan publik yang setara, dan Dana Desa mendukung pemerataan pembangunan tingkat desa; (3) Dana Insentif Fiskal diberikan ke daerah berbasis kinerja, seperti daerah yang berhasil mengendalikan inflasi, menurunkan *stunting*, meningkatkan PAD, dan menjaga lingkungan; (4) pengalokasian program prioritas yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di daerah, seperti Makan Bergizi Gratis, Revitalisasi Sekolah dan Madrasah, TPG Non PNS dan TPD Non PNS serta pengembangan guru, PIP, KIP Kuliah, BOS dan Beasiswa lainnya, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, PBI Jaminan Kesehatan, Layanan Fasilitas Kesehatan, Subsidi Energi dan Kompensasi, Subsidi Non Energi, PKH dan Kartu Sembako, LPDP, Perumahan, KDMP, preservasi jalan dan jembatan, serta pembangunan lumbung pangan dan cadangan pangan; (5) kolaborasi pendanaan, di mana terus didorong sinergi pendanaan, baik dari K/L, TKD, BUN, dan pembiayaan lainnya seperti pembiayaan kreatif (*creative financing*); dan (6) pengawasan dan evaluasi, yaitu Pemerintah melalui Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes, dan Bappenas memastikan belanja yang dilakukan di daerah benar-benar mendukung pelayanan dasar dan pembangunan yang merata, serta evaluasi dilakukan dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan laporan kinerja fiskal daerah.

Pemerintah mengapresiasi pandangan yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golongan Karya** mengenai pemahaman terkait besaran alokasi TKD tahun 2026. Dapat kami sampaikan bahwa pengalokasian TKD tahun 2026 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk menciptakan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2026 sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja

pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan; (2) mendukung daya saing daerah melalui belanja produktif, sinergi dengan pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power; (3) meningkatkan efektivitas peran TKD agar sejalan dengan Prioritas Nasional utamanya pendidikan, kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, dan ketahanan pangan; (4) menyeimbangkan fiskal pusat dan daerah (vertical balance) serta antardaerah (horizontal balance); (5) dukungan untuk program prioritas Pemerintah dan belanja pemerintah daerah utamanya belanja gaji dan tunjangan melekat Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), operasional kantor, dan pelayanan publik; (6) memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah; (7) Dana Desa untuk membangun desa dan memberdayakan masyarakat serta mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih; dan (8) mendorong pembiayaan kreatif/inovatif untuk pembangunan daerah.

Dapat kami sampaikan juga, Pemerintah terus memperkuat sinergi pemanfaatan TKD dan PDRD untuk pemerataan kualitas layanan publik di daerah. Sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD ditetapkan, Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemerintah daerah lebih optimal dalam meningkatkan PAD antara lain melalui: (1) simplifikasi dan harmonisasi pajak daerah; (2) memberikan insentif fiskal berbasis kinerja bagi daerah yang berhasil meningkatkan PAD, memperbaiki tata kelola, dan inovasi dalam pelayanan publik; (3) memberikan dukungan teknis penguatan kapasitas pengelolaan PAD; (4) mendorong ekspansi basis pajak daerah; (5) kebijakan TKD yang lebih berbasis kinerja, di mana TKD diarahkan tidak hanya menutup gap fiscal tapi juga mendorong good governance dan optimalisasi PAD; dan (6) mendorong digitalisasi dan integrasi data pajak.

Kami juga sependapat dengan tanggapan **Fraksi Partai Golongan Karya** bahwa Pemerintah agar memberi perhatian khusus terutama bagi daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), baik melalui mekanisme Belanja Pemerintah Pusat maupun melalui Transfer ke Daerah. Dapat kami sampaikan

bahwa kebijakan TKD, khususnya DAK diarahkan untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, dan operasionalisasi layanan publik serta afirmasi daerah 3T. Pemerintah akan memberikan dukungan pendanaan pembangunan di bidang-bidang yang merupakan urusan wajib dan/atau sarana prasarana dasar sesuai prioritas nasional, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan stunting, serta produksi dan distribusi pertanian, terutama pada daerah 3T. Selain itu, kebijakan TKD juga diarahkan untuk memperkuat sinergi pendanaan dari TKD dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial serta matching progame. Dalam RAPBN tahun 2026, pengalokasian Transfer ke Daerah tetap memberikan perhatian kepada daerah kategori 3T, antara lain dilakukan melalui:

- a. Dalam penghitungan alokasi DAU terdapat faktor penyesuaian yang mencerminkan karakteristik daerah yang direpresentasikan melalui indeks-indeks tertentu seperti indeks kemahalan konstruksi, indeks biaya hidup, indeks daerah kepulauan dan lain-lain.
- b. Desain kebijakan DAK TA 2026 salah satunya diarahkan untuk mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, dan operasionalisasi layanan publik serta afirmasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
- c. Penghitungan Dana Desa telah memasukkan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Desa, yaitu angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
- d. Pada DAK Nonfisik terkait pendidikan tahun 2026, diberikan alokasi tunjangan khusus guru ASND sebesar Rp2,5 triliun yang dialokasikan sebagai kompensasi atas kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah

khusus, seperti daerah terpencil, terbelakang, dan daerah perbatasan dengan negara lain. Pada DAK Nonfisik bidang kesehatan tahun 2026, perhatian terhadap daerah tertinggal diberikan melalui Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan (DTPK) untuk meningkatkan peminatan penempatan dokter spesialis dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan di daerah

Selanjutnya, menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, terkait alokasi TKD, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah memahami adanya perhatian publik terhadap perubahan struktur Belanja Negara dalam RAPBN 2026, khususnya terkait peningkatan Belanja Pemerintah Pusat dan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD). Namun, yang perlu menjadi perhatian bersama bahwa kebijakan ini untuk memperkuat efektivitas belanja publik dan memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia sehingga otonomi daerah akan mampu menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyesuaian besaran TKD merupakan bagian dari strategi untuk meningkatkan efektivitas belanja negara agar manfaatnya lebih cepat, terstandardisasi dan langsung dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kebijakan dan anggaran TKD tahun 2026 tidak dapat dipisahkan dengan program prioritas Pemerintah di tahun 2026, diantaranya Makan Bergizi Gratis, Revitalisasi Sekolah, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, PBI Jaminan Kesehatan, KDMP, preservasi jalan dan jembatan, serta pembangunan lumbung pangan. Program-program prioritas nasional tersebut akan dilaksanakan dan melibatkan masyarakat di daerah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan layanan dasar masyarakat di daerah serta pemberdayaan perekonomian daerah. Pemerintah akan memastikan bahwa sinergi dan koordinasi pusat-daerah akan tetap diperkuat. Kementerian/Lembaga akan didorong untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program dapat selaras, serta

mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harmonisasi dan sinergi kebijakan pusat-daerah juga menjadi salah satu pilar penting untuk mewujudkan belanja yang semakin efisien dan produktif, layanan publik yang semakin berkualitas, serta kesejahteraan rakyat yang semakin merata dan berkeadilan, dengan tetap menjaga tata kelola dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan pembangunan tetap berjalan berkesinambungan, daerah semakin mandiri dalam mengelola keuangannya, dan setiap rupiah dari APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan ruang fiskalnya dengan terus mendorong inovasi pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan serta menjaga belanja semakin efisien dan produktif.

Terkait dengan upaya Pemerintah daam mendorong Pemda untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah sebagaimana yang disampaikan oleh **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya perlu semakin dioptimalkan. Kebijakan dalam optimalisasi PAD terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tetap menjaga akses masyarakat terhadap layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha serta investasi. Arah kebijakan utama untuk mobilisasi PAD meliputi :

- a. Optimalisasi pemungutan PDRD untuk mendorong peningkatan belanja produktif melalui modernisasi administrasi perpajakan daerah.
- b. Penguatan penerapan kebijakan PKB beserta opsen PKB dan PBB-P2 dengan tetap memerhatikan beban WP.
- c. Kebijakan PDRD yang mampu meningkatkan daya saing.
- d. Sinergitas Pemungutan Pajak antardaerah dan antar level pemerintahan.
- e. Menetapkan Target Pertumbuhan PAD, dengan mempertimbangkan potensi penerimaan PAD serta kondisi makroekonomi daerah.

- f. Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan daerah.
- g. Penguatan strategi komunikasi publik dalam rangka implementasi kebijakan PDRD di masing-masing wilayah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar DBH SDA dapat sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim. Dalam rangka mengurangi dampak eksternalitas negatif dalam eksplorasi SDA, sesuai UU 1/2022 telah dialokasikan DBH untuk daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil baik yang satu provinsi maupun tidak. Alokasi DBH SDA 10 persen ditentukan oleh kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, kebijakan DBH tahun 2026 yaitu: (1) memperkuat sinergi alokasi DBH dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan program prioritas Pemerintah; (2) mendukung kapasitas APBD serta program prioritas tertentu yaitu cukai hasil tembakau, dana rebosiasi, dan tambahan DBH migas otsus; (3) meningkatkan upaya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA dengan memperhatikan upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; serta (4) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja, penguatan sinergi penggunaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai NasDem** bahwa perbaikan perlu terus dilakukan untuk memastikan pengalokasian dana transfer terus optimal. Beberapa upaya yang dilakukan terkait dengan pandangan mengenai keterlambatan terkait penyaluran DBH, dapat dijelaskan sebagai berikut.

Penyaluran DBH mulai TA 2025 dilakukan secara bulanan untuk menjaga likuiditas keuangan di daerah. Pemerintah terus melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan informasi dan edukasi mengenai syarat salur DBH kepada pemerintah daerah. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah daerah

menyampaikan syarat salur DBH sesuai ketentuan, sehingga penyaluran DBH dapat dilakukan tepat waktu.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar Pemerintah melakukan penilaian berbasis kinerja dan berbagai upaya lainnya sehingga pelaksanaan dan penyaluran DAU berjalan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, langkah-langkah yang sedang dilakukan meliputi Penajaman kinerja penyaluran dan penyerapan di daerah melalui indikator penggunaan DAU *earmarking* agar alokasi DAU benar-benar mendorong perbaikan layanan publik dan pembangunan daerah. Untuk mendukung hal tersebut, maka kebijakan DAU akan diarahkan untuk: (1) memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam peningkatan sumber daya manusia untuk mendukung tugas pemerintahan daerah; (2) mendukung kapasitas APBD serta melaksanakan program prioritas nasional; (3) meningkatkan tata kelola DAU mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi; (4) meningkatkan kualitas dan akurasi data dasar perhitungan DAU; (5) penyesuaian perhitungan DAU untuk mendorong perbaikan pemerataan keuangan dan layanan publik; dan (6) melanjutkan kebijakan penyaluran DAU dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan APBD berdasarkan kinerja laporan pemerintah daerah.

Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan simplifikasi persyaratan salur untuk mempercepat penyaluran, tanpa mengurangi akuntabilitas dan transparansi. Kemudian, upaya untuk terus mengembangkan aplikasi penyaluran DAU yang lebih terintegrasi diupayakan untuk mempermudah proses penyaluran, baik untuk *block grant* maupun *specific grant*, sehingga lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas transfer ke daerah, mempercepat realisasi anggaran, dan mendukung pencapaian target pembangunan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyaluran DAU, Pemerintah melaksanakan koordinasi dan pemberian edukasi secara berkala kepada pemerintah daerah dan mendekatkan layanan ke pemerintah daerah

melalui pengalihan penyampaian syarat salur dan penyaluran DAU melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

Pemerintah menghargai **Fraksi Partai NasDem** dapat memahami peningkatan belanja pusat dalam mendukung program prioritas di daerah, yang sejatinya dinikmati oleh masyarakat di daerah. Pemerintah sependapat bahwa perbaikan perlu terus dilakukan untuk memastikan pengalokasian dana transfer terus optimal. Beberapa upaya yang dilakukan terkait dengan pandangan mengenai DAU yang belum sensitif terhadap daerah yang memiliki karakteristik geografis khusus seperti wilayah kepulauan, dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengalokasian DAU pada tahun 2026 akan berfokus pada pemerataan keuangan antardaerah, dukungan pemenuhan belanja pegawai ASND, dan layanan publik daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut, penghitungan alokasi DAU dilakukan menggunakan formula Celah Fiskal yang merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan Daerah. Kebutuhan Fiskal dihitung dengan memperhatikan satuan biaya dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penghitungan alokasi DAU terdapat faktor penyesuaian yang mencerminkan karakteristik daerah yang direpresentasikan melalui indeks-indeks tertentu seperti Indeks kemahalan konstruksi, indeks daerah kepulauan, indeks ketahanan pangan dan lain-lain.

Terkait tanggapan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) jangka menengah, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, DAK Jangka Menengah disusun dalam rangka mendukung pencapaian target Asta Cita, Program Prioritas, dan Program Hasil Terbaik Cepat presiden, dengan tujuan untuk pertumbuhan berkualitas, penurunan kemiskinan, dan SDM Berkualitas. Desain kebijakan DAK TA 2026 selaras dengan DAK Jangka Menengah diarahkan untuk: (1) mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, dan operasionalisasi

layanan publik serta afirmasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar); (2). memperkuat sinergi pendanaan DAK dengan belanja K/L dan pendanaan lainnya dengan menerapkan konsep keterpaduan melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial serta *matching program*; (3) penguatan tata kelola penyaluran langsung kepada penerima manfaat dan penyedia layanan, antara lain tunjangan guru, tunjangan dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan; (4) melanjutkan dukungan pembangunan dan pengembangan MRT Jakarta dengan menyinergikan pembiayaan dan hibah ke daerah; dan (5) penguatan kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai dampak yang ditargetkan..

Selanjutnya, kebijakan DAK Fisik dalam tahun 2026 akan diarahkan untuk dukungan pendanaan pembangunan di bidang yang merupakan urusan wajib dan/atau sarana prasarana dasar sesuai prioritas nasional, mendukung pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan stunting, serta produksi dan distribusi pertanian, terutama pada daerah 3T. Sementara itu, Pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik untuk mempercepat penyediaan layanan dasar publik di daerah yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berupa penyediaan operasionalisasi layanan publik. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah mengalokasikan DAK Nonfisik tahun 2026 yang terdiri atas: Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana Tunjangan Guru ASND, Dana BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa Pemerintah harus meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY. Peningkatan kualitas dan penguatan tata kelola dana otsus telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyempurnaan kebijakan melalui

penetapan PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus, sebagai pengganti PMK Nomor 76/PMK.07/2022. Perbaiki tata kelola otsus meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan. Saat ini sedang dibangun integrasi antar sistem aplikasi tata kelola dana otsus dengan prinsip interoperabilitas antara SIKD, SIPD, dan SIPPP dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola dana otsus. Dana otsus digunakan untuk mendanai kegiatan yang mendorong dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pembangunan manusia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan tata kelola Dana Keistimewaan, telah diatur melalui PMK 163 tahun 2023 diantaranya keterlibatan APIP daerah dalam perencanaan dan penyaluran Dana Keistimewaan dan sinergi program/kegiatan Dana Keistimewaan dengan program/kegiatan Kementerian/Lembaga serta usulan dana keistimewaan oleh pemda dan evaluasi oleh K/L dilakukan melalui aplikasi terintegrasi antara SIKD DAIS dengan aplikasi perencanaan. Program dan kegiatan yang menggunakan Dana Keistimewaan diantaranya untuk mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan Dana Keistimewaan, penggunaannya dapat melalui efisiensi untuk belanja penunjang kegiatan dan operasional perkantoran.

Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI tahun 2026 meliputi: (1) mendukung Program Prioritas Nasional dengan memperkuat sinergitas peran K/L; (2) menyelaraskan kebijakan Dana Otsus dan DTI dengan target capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua dalam rangka mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif; (3) menyinergikan perencanaan dan penggunaan Dana Otsus dan DTI dengan jenis pendanaan lain; (4) meningkatkan kualitas penyaluran yang didasarkan pada kinerja realisasi anggaran dan capaian output Dana Otsus dan DTI; dan (5) meningkatkan kualitas tata kelola melalui peningkatan kualitas SDM dan dukungan sistem informasi yang terintegrasi dengan prinsip interoperabilitas.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa dana desa agar dapat dimanfaatkan untuk penanganan kemiskinan ekstrem, mendukung program Asta Cita, dan KDMP. Dapat kami sampaikan bahwa Dana Desa adalah bagian dari TKD yang ditujukan untuk percepatan pembangunan desa, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah di Indonesia.

Selanjutnya, kebijakan dana desa tahun 2026 diarahkan (1) fokus pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung program Pemerintah berpedoman pada Asta Cita sesuai kewenangan desa; (2) memberikan dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP); (3) menambah kriteria Alokasi Afirmasi berupa desa yang memiliki risiko tinggi terhadap perubahan iklim dan bencana; dan (4) transformasi skema penyaluran dalam mendukung tata kelola APBN yang sehat dan kredibel.

Terkait dengan Dana Insentif Fiskal, Pemerintah sependapat dengan pendapat **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dimana Dana Insentif Fiskal diarahkan untuk mendorong perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah mendukung perbaikan tata kelola keuangan dan kinerja pemerintah daerah, melalui pemberian Dana Insentif Fiskal terhadap daerah yang memiliki kinerja terbaik pada program prioritas nasional serta pemberian Dana Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya yang lebih kompetitif yang hanya diberikan kepada 50 daerah terbaik setiap kinerja.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Kebijakan Dana Insentif Fiskal diarahkan (1) mengalokasikan Dana Insentif Fiskal berdasarkan kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya, kinerja pemerintah daerah tahun berjalan, dan/atau kinerja spesifik pemerintah daerah; (2) mempertajam indikator penilaian kinerja pemerintah daerah tahun sebelumnya atas pengelolaan keuangan Pemerintah, pelayanan dasar, dukungan fokus kebijakan nasional, dan sinergi kebijakan Pemerintah; (3) menggunakan indikator penilaian kinerja spesifik pemerintah

daerah yang berkinerja baik sesuai prioritas nasional; dan (4) mendorong peningkatan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah serta peningkatan kualitas penggunaan Dana Insentif Fiskal.

Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada **Fraaksi Partai Gerindra** DPR RI atas pandangan positif dan dukungan konstruktif terhadap kebijakan fiskal yang tertuang dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026. Penetapan defisit anggaran sebesar 2,48% terhadap PDB serta tren keseimbangan primer yang semakin mendekati nol mencerminkan komitmen kuat kita bersama untuk menjaga disiplin fiskal dan keberlanjutan APBN. Pandangan bahwa APBN berada *on the track* sejalan dengan upaya pemerintah dalam memastikan pengelolaan fiskal yang sehat, kredibel, dan bertanggung jawab, sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan pembangunan nasional. Kami juga menyambut baik harapan agar ke depan APBN dapat mencapai kondisi tanpa defisit, dan hal ini tentu menjadi semangat bersama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan ketahanan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

D. DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL

Pemerintah memahami pandangan yang disampaikan Fraksi **Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera**, serta **Partai Amanat Nasional** mengenai keseimbangan primer, defisit RAPBN, dan pentingnya menjaga disiplin fiskal dalam RAPBN 2026. Perlu kami sampaikan bahwa keseimbangan primer dalam RAPBN 2026 diperkirakan negatif Rp39,4 triliun, lebih rendah dibanding *outlook* 2025 sebesar negatif Rp109,5 triliun. Perbaikan ini menunjukkan arah konsolidasi fiskal yang konsisten pasca pandemi, sekaligus mencerminkan upaya Pemerintah untuk secara bertahap menuju keseimbangan primer yang positif.

Berlanjutnya tren keseimbangan primer yang negatif di tahun 2026 menunjukkan bahwa pendapatan negara masih lebih rendah dibanding belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Namun demikian, Pemerintah menilai bahwa kebijakan fiskal ekspansif tetap diperlukan untuk mendukung akselerasi pembangunan, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, serta memastikan program-program prioritas dapat dijalankan. Dalam konteks ini, defisit RAPBN 2026 yang direncanakan sebesar Rp638,8 triliun (2,48% PDB) tetap berada di bawah ambang batas 3 persen PDB sesuai amanat UU Keuangan Negara, sehingga dapat dikatakan terkendali, terukur, dan aman bagi kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang.

Pemerintah sejalan dengan pandangan bahwa konsolidasi fiskal harus disertai dengan upaya meningkatkan pendapatan negara, baik melalui reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, pemanfaatan digitalisasi sistem perpajakan, maupun optimalisasi PNBPN. Pada saat yang sama, efektivitas belanja negara juga terus diperkuat dengan menekankan alokasi yang produktif, tepat sasaran, dan mendukung transformasi ekonomi. Dengan kombinasi disiplin fiskal dan peningkatan kualitas belanja, Pemerintah menargetkan agar keseimbangan primer dapat berangsur positif dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam aspek pembiayaan, Pemerintah memastikan bahwa strategi yang ditempuh akan dilakukan secara aman, hati-hati, dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya (*cost*) dan risiko (*risk*). Pengelolaan utang dilakukan secara *prudent* melalui bauran instrumen yang optimal, penerbitan yang fleksibel dan oportunistik, serta penguatan pasar keuangan domestik untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal. Kebijakan ini diperkuat oleh manajemen risiko fiskal yang komprehensif, mencakup pemantauan risiko makroekonomi, kewajiban kontinjensi, hingga fiskal daerah, serta didukung oleh penyusunan strategi mitigasi yang terukur.

Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah menegaskan bahwa APBN tidak hanya dijaga agar tetap sehat dan berkesinambungan, tetapi juga tetap mampu menjadi instrumen utama dalam mendukung transformasi ekonomi yang inklusif, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, bahwa defisit tahun anggaran 2026 harus dikelola secara hati-hati sehingga tetap terkendali guna mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dan bisa merefleksikan arahan kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka mewujudkan Asta Cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, maka harus dikelola secara terukur dan hati-hati sehingga tetap *manageable* dan aman bagi keberlangsungan fiskal jangka menengah dan panjang.

Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait pemilihan sumber pembiayaan anggaran baik yang berasal dari komponen pembiayaan utang maupun non utang wajib memperhatikan keseimbangan antara biaya (*cost*) dan risiko (*risk*) yang tepat sehingga masih berada pada level *risk appetite* dan mengurangi risiko pembiayaan dengan *cost of fund* yang tinggi. Selain itu, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** yang

menekankan pentingnya pembiayaan agar tetap diarahkan pada instrument yang efisien, memperkuat basis investor domestik, serta diimbangi dengan kualitas belanja yang produktif. Dapat dijelaskan pula bahwa pengelolaan utang tidak hanya untuk menutupi kebutuhan APBN, tetapi juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien.

Pemerintah memastikan pengelolaan utang berjalan secara prudent, akuntabel, dan terkendali, sehingga dapat keberlanjutan fiskal terjaga. Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang yang memenuhi prinsip-prinsip:

- 1) akseleratif, dengan memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan dan menjaga momentum pertumbuhan;
- 2) efisien, dengan memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan dan diversifikasi instrumen utang;
- 3) seimbang, dengan menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal pada keseimbangan antara biaya minimal dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi dalam rangka mendukung keberlanjutan fiskal.

sebagaimana tercantum dalam RAPBN, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp781,9 triliun, yang terdiri dari penerbitan SBN neto Rp749,2 triliun dan pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun. Dibandingkan outlook 2025, komposisi ini mencerminkan penguatan peran SBN sebagai instrumen utama pembiayaan APBN, sejalan dengan strategi Pemerintah untuk mengembangkan pasar keuangan domestik dan memperluas basis investor.

Pemerintah sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan utang harus dilakukan secara prudent dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya (*cost*) dan risiko (*risk*). Untuk itu, penerbitan SBN akan diarahkan secara fleksibel dan oportunistik, dengan memanfaatkan momentum pasar agar biaya tetap efisien, risiko terkendali, serta didukung oleh instrumen berjangka menengah-panjang guna menjaga profil jatuh tempo utang. Di sisi lain, pembiayaan pinjaman akan

lebih selektif dan diarahkan untuk mendukung program prioritas, dengan tetap mengedepankan efisiensi, transparansi, serta memperkuat kerja sama internasional.

Pemerintah juga menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan utang senantiasa disinergikan dengan strategi *liability management* untuk meratakan beban jatuh tempo, sekaligus menjaga stabilitas pasar SBN. Upaya ini berjalan beriringan dengan penguatan basis investor domestik, baik institusi maupun ritel, serta pengembangan instrumen berbasis syariah dan instrumen berkelanjutan (*green* dan *sustainable bonds*).

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** agar pembiayaan utang tidak hanya bersifat menutup defisit, tetapi dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang mampu memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, Pemerintah memastikan strategi pengelolaan utang tahun 2026 dapat meredam gejolak dan mendukung agenda pembangunan. Kebijakan yang ekspansif ini dibutuhkan agar APBN dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pembangunan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** yang menekankan pentingnya pembiayaan utang agar tetap diarahkan pada instrumen yang efisien, memperkuat basis investor domestik, serta diimbangi dengan kualitas belanja yang produktif, kiranya dapat dijelaskan bahwa pengelolaan utang tidak hanya untuk menutupi kebutuhan APBN, tetapi juga diarahkan sebagai sarana untuk mendukung pengembangan pasar keuangan domestik yang dalam, aktif, likuid, inklusif, dan efisien. Dalam mengelola utang, Pemerintah senantiasa memperhatikan prinsip (1) akseleratif (memanfaatkan utang sebagai katalis percepatan pembangunan), (2) efisien (memperhatikan penerbitan utang dengan biaya yang minimal), (3) seimbang (menjaga portofolio utang Pemerintah yang optimal, seimbang antara biaya minimal dan tingkat risiko). Dengan senantiasa mengelola utang secara prudent, terukur, terarah, dan terkendali, serta melalui penegakan disiplin fiskal yang konsisten, pembiayaan utang tetap terjaga stabil.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** mengenai sumber pembiayaan defisit dari penerbitan SBN 10 tahun dengan yield pada kisaran 6,6–7,2 persen kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah senantiasa mensinergikan kebijakan pembiayaan utang dengan strategi *liability management* untuk meratakan beban jatuh tempo, sekaligus menjaga stabilitas pasar SBN. Upaya ini berjalan beriringan dengan penguatan basis investor domestik, baik institusi maupun ritel, serta pengembangan instrumen berbasis syariah dan instrumen berkelanjutan (*green dan sustainable bonds*).

Pemerintah memandang bahwa SBN akan tetap menjadi instrumen utama pembiayaan dalam RAPBN 2026. Peran SBN tidak hanya sebatas untuk menutup defisit, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengembangan dan stabilisasi pasar keuangan domestik. Keberadaan SBN sebagai acuan (*benchmark*) sangat dibutuhkan oleh pelaku pasar, serta memberikan pilihan investasi yang aman, likuid, dan kredibel bagi investor baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Terkait asumsi yield SBN 10 tahun pada kisaran 6,6–7,2 persen, Pemerintah menilai bahwa penetapan kisaran tersebut merupakan hasil kalkulasi yang cukup konservatif ditengah kondisi pasar keuangan global yang masih diliputi ketidakpastian yang bersumber dari faktor ekonomi maupun non-ekonomi. Namun demikian, Pemerintah juga tidak mengabaikan peluang positif dari tren penurunan inflasi global dan potensi pelonggaran kebijakan moneter di negara maju, yang dapat mendorong yield bergerak lebih rendah. Dengan disiplin fiskal yang terjaga, kredibilitas kebijakan yang konsisten, diiringi respons pasar yang positif, Pemerintah optimistis yield SBN dapat dikelola pada level yang efisien dan kompetitif.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang memandang positif langkah Pemerintah dalam penggunaan SAL dan HPA sebagai *fiscal buffer* dalam menghadapi ketidakpastian global, serta pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** yang sejalan dengan Pemerintah jika dalam hal

terdapat dinamika kebijakan fiskal di tahun 2026, Pemerintah dapat menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai sumber pembiayaan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat disampaikan bahwa Pemerintah mengapresiasi atas kesepemahaman **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap rencana Pemerintah untuk menggunakan dana SAL dalam RAPBN tahun anggaran 2026.

Pada RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL sebagai instrumen pengurang utang dan *fiscal buffer* sebesar Rp60.000,0 miliar dan alokasi HPA sebesar Rp400,0 miliar.

Lebih lanjut, Pemerintah berkomitmen menjaga kehati-hatian fiskal melalui kebijakan optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal (*fiscal buffer*) di tengah kondisi perekonomian domestik dan global yang masih penuh tantangan. Pada tahun 2026, pengelolaan SAL akan dilakukan secara efisien dan optimal, antara lain dengan menempatkan sebagian dana pada instrumen keuangan jangka pendek yang memiliki tingkat risiko terkelola. Selain itu, pemanfaatan SAL Level Efisien juga menjadi bagian dari strategi optimalisasi untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan kebutuhan pembiayaan. Di sisi lain, apabila dibutuhkan, SAL tetap dapat digunakan untuk menutup defisit APBN sehingga berfungsi sebagai bantalan fiskal yang fleksibel. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan kondisi fiskal, SAL dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan yang adaptif, memberikan ruang antisipatif bagi APBN dalam menghadapi dinamika global maupun domestik. Melalui langkah ini, Pemerintah memastikan kredibilitas APBN tetap terjaga serta memperkuat fungsinya sebagai instrumen utama stabilisasi ekonomi.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** yang memahami bahwa pembiayaan investasi dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan nilai tambah BUMN dan BLU serta mengoptimalkan peran *agent of development* dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan rakyat, kiranya dapat dijelaskan bahwa Dalam RAPBN tahun anggaran 2026, Pemerintah menyusun kebijakan dan arah pembiayaan investasi yang diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pembiayaan investasi dalam kurun waktu 2025–2029 berfokus pada antara lain: (1) pengelolaan pembiayaan investasi untuk mendorong produktivitas, penurunan kemiskinan, serta pembiayaan *below the line* yang mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis antara lain infrastruktur, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi, mencakup agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*), serta energi baru terbarukan; (2) penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), *Special Mission Vehicle* (SMV), dan *Sovereign Wealth Funds* (SWF), serta (3) optimalisasi pembiayaan investasi, utamanya kepada BUMN sebagai *agent of development*.

Selanjutnya, atas pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Demokrat** mengenai prinsip kehati-hatian dan pengawasan Danantara, dapat dijelaskan bahwa pembentukan BPI Danantara sebagai *super holding* BUMN menjadi bagian dari strategi penguatan pengelolaan aset dan investasi negara. Secara struktur organisasi, di bawah *Chief Executive Officer* (CEO) Danantara terdapat dua fungsi yang menggambarkan dua tugas utama Danantara, yaitu *Chief Operating Officer* (COO) dan *Chief Investment Officer* (CIO). Struktur ini dirancang untuk mendorong kolaborasi operasional serta optimalisasi investasi secara terarah dan terukur. COO membangun sinergi dan efisiensi antarentitas BUMN dalam rangka menciptakan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, profesional, dan produktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang ditetapkan Pemerintah.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai efisiensi pembiayaan investasi dengan kehadiran Danantara, dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU Nomor 1 Tahun 2025), terdapat beberapa hal yang mengalami perubahan antara lain Pemerintah masih dapat memberikan PMN yang bersumber dari APBN ke Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN namun hanya dapat dilakukan dalam rangka penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah. Dalam RAPBN TA 2026, PMN kepada BUMN dalam rangka penugasan dialokasikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (persero) dalam rangka dukungan pembiayaan program FLPP.

Lebih lanjut, sehubungan dengan pertanyaan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai transparansi dan akuntabilitas BUMN, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah membentuk Danantara sebagai lembaga pengelola aset negara dan manajer investasi Pemerintah, memperkuat upaya percepatan di sisi investasi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Danantara diharapkan memainkan peran sebagai super holding bagi BUMN, menggantikan peran Kementerian BUMN yang nantinya akan lebih banyak mengambil porsi sebagai regulator. Tujuannya adalah membangun sinergi dan efisiensi antarentitas BUMN guna menciptakan pengelolaan aset dan investasi yang lebih terintegrasi, akuntabel, profesional, dan produktif dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa investasi yang direncanakan harus disertai dengan nilai tambah dan nilai ekonomi yang akan diperoleh di masa depan. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian atas usulan investasi tersebut, beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek manfaat, dan aspek lainnya sebagaimana yang diatur di dalam PMK Nomor 218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah. Selain itu, salah satu kebijakan fiskal terkait Pembiayaan Investasi

TA 2026 dalam KEM-PPKF Tahun 2026 adalah meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Pengukuran Efektivitas Investasi Pemerintah dalam RAPBN 2026 dilakukan dengan mengukur nilai tambah yang diperoleh, yaitu manfaat langsung maupun tidak langsung yang timbul dari investasi pemerintah dari sisi ekonomi, sosial, fiskal yang memperhatikan keseimbangan dengan biaya dan risiko.

Sehubungan dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** yang secara khusus menyambut baik Pemerintah yang telah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25,0 triliun dalam RAPBN tahun anggaran 2026, diantaranya alokasi Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp15 triliun, maka dapat disampaikan bahwa Pemerintah mengapresiasi atas kesepahaman **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** atas penetapan salah satu tujuan pembiayaan investasi dan jumlah rencana investasi Pemerintah dalam Dana Abadi Pendidikan pada RAPBN tahun anggaran 2026.

Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam RAPBN tahun anggaran 2026 Pemerintah telah mengalokasikan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25,0 triliun dengan rincian alokasi Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) sebesar Rp15,0 triliun, Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4,0 triliun, Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp2,0 triliun, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp4,0 triliun.

Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan investasi kepada LPDP untuk Dana Abadi di Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatkan jumlah SDM yang berkualitas di Indonesia; (2) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui SDM yang berkualitas; (3) meningkatkan kualitas perguruan tinggi yang mampu bersaing secara global; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas riset di Indonesia; serta (5) tersedianya dana untuk pendidikan antargenerasi.

Menjawab pertanyaan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai alokasi investasi untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dapat dijelaskan bahwa pengalokasian investasi pada Program FLPP sebesar Rp25,1 triliun dilakukan dalam rangka pencapaian target awal penyaluran sebanyak 285.000 unit rumah bagi MBR. Tambahan investasi untuk Program FLPP dialokasikan di dalam Cadangan Pembiayaan Investasi untuk pencapaian tambahan target menjadi 350.000 unit rumah bagi MBR dalam rangka mendukung target penyediaan tiga juta rumah bagi MBR sesuai RPJMN 2025-2029.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai penguatan UMKM, koperasi, dan industri padat karya, kiranya dapat dijelaskan bahwa Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekonomi berbasis desa, koperasi, dan UMKM sebagai fondasi ketahanan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi gejolak global. UMKM yang mencakup lebih dari 64 juta unit usaha dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam rangka mendukung UMKM, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan melalui program KUR, Ultra Mikro (UMi), dan penyaluran melalui Lembaga Pengelola dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM) Kementerian UMKM serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yang disertai insentif perpajakan dan program pendampingan terpadu.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa Pemberian Pinjaman berperan sebagai opsi pendanaan selektif berbunga rendah bagi BUMN dan Pemerintah Daerah. Alokasi pinjaman ini merupakan bagian dari dukungan Pemerintah terhadap pelaksanaan program dan proyek strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama untuk belanja modal (*capital expenditure*) yang berkontribusi pada pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's).

Pemberian Pinjaman telah dan terus mendukung penyelesaian proyek energi baru terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, dan *mini hydro*. Di bidang infrastruktur, pendanaan difokuskan pada sektor vital seperti pelabuhan, jalan tol, rumah sakit, dan sistem penyaluran air minum untuk meningkatkan layanan publik serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.